

## PBAB II

# EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2015 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

### 2.1. Gambaran Umum Kondisi Kota Ambon

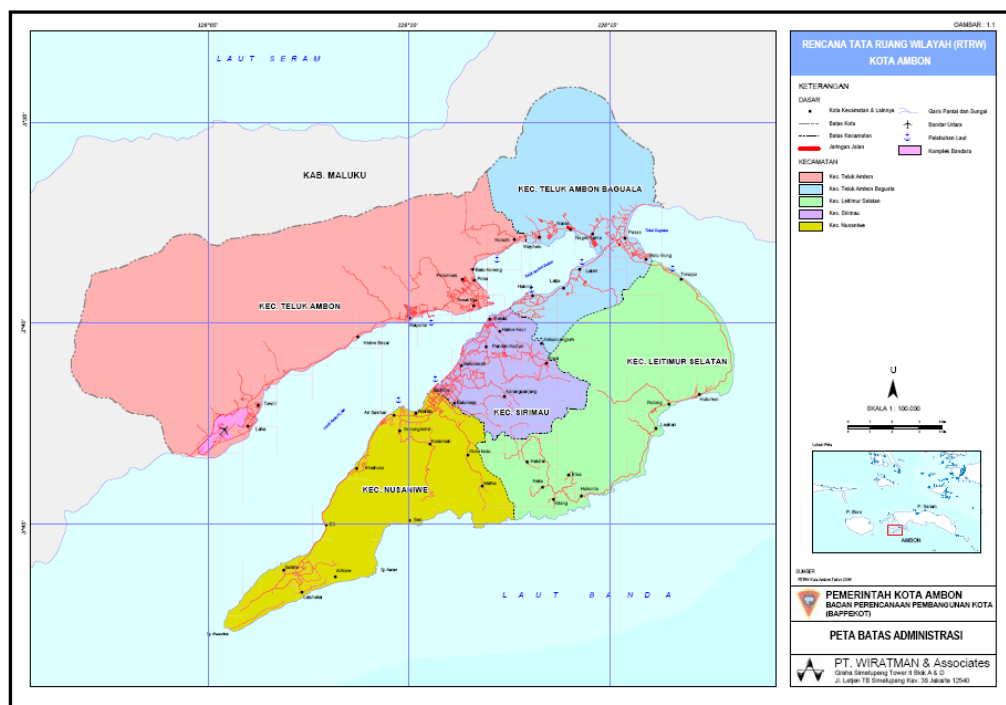
#### 2.1.1. Kondisi Geografi dan Demografi

##### a. Kondisi Geografi

Kota Ambon adalah kota di Pulau Ambon, suatu pulau kecil di Provinsi Maluku, suatu provinsi Kepulauan. Dalam ruang nasional, Kota Ambon adalah Pusat Kegiatan Nasional (PKN) di Propinsi Maluku.

#### 1. Luas, Letak dan Batas Administrasi Kota Ambon

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979, Kota Ambon memiliki luas 377 Km<sup>2</sup> atau 2/5 dari luas wilayah Pulau Ambon. Luas daratan Kota Ambon berdasarkan hasil Survey Tata Guna Tanah tahun 1980 adalah 359,45 km<sup>2</sup>, sedangkan luas lautan 17,55 Km<sup>2</sup> dengan panjang garis pantai 98 Km.



Sumber: BAPPEKOT Kota Ambon, 2014

**Gambar II.1. Wilayah Administrasi Kota Ambon dengan 5 Kecamatan**

Secara Astronomis, wilayah administrasi Kota Ambon berada antara 3°-4° Lintang Selatan, dan 128° -129° Bujur Timur (Gambar II.1), dan dikelilingi oleh pantai serta diapit oleh teluk, yaitu Teluk Ambon, dan Teluk Baguala. Batas-batas administrasi Kota Ambon adalah:

- Sebelah Utara : Petuanan Desa Hitu, Hila dan Kaitetu dari Kecamatan Leihutu Kabupaten Maluku Tengah.

- Sebelah Selatan : Laut Banda
- Sebelah Timur : Petuanan Desa Suli dari Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah.
- Sebelah Barat : Petuanan Desa Hatu dari Kecamatan Leihitu Barat Kabupaten Maluku Tengah

Secara administrasi, Kota Ambon terdiri dari 5 kecamatan yang meliputi 20 kelurahan dan 30 desa/negeri (Gambar II.1). Jumlah desa/ negeri dan kelurahan serta luas setiap kecamatan adalah seperti pada Tabel II.1.

**Tabel II.1. Keadaan Wilayah Administrasi Kota Ambon Per Kecamatan**

No.	Kecamatan	Ibukota	Jumlah Desa/Negeri/ Kelurahan		Luas Wilayah Daratan (Km <sup>2</sup> )
			Desa/ Negeri	Kelurahan	
1	Nusaniwe	Amahusu	5	8	88,35
2	Sirimau	Karang Panjang	4	10	86,82
3	T.A.Baguala	Passo	6	1	40,11
4	Leitimur Selatan	Leahari	8	-	50,50
5	Teluk Ambon	Wayame	7	1	93,67
<b>Kota Ambon</b>			<b>30</b>	<b>20</b>	<b>359,45</b>

Sumber: BPS Kota Ambon, 2014

## 2. Topografi Kota Ambon

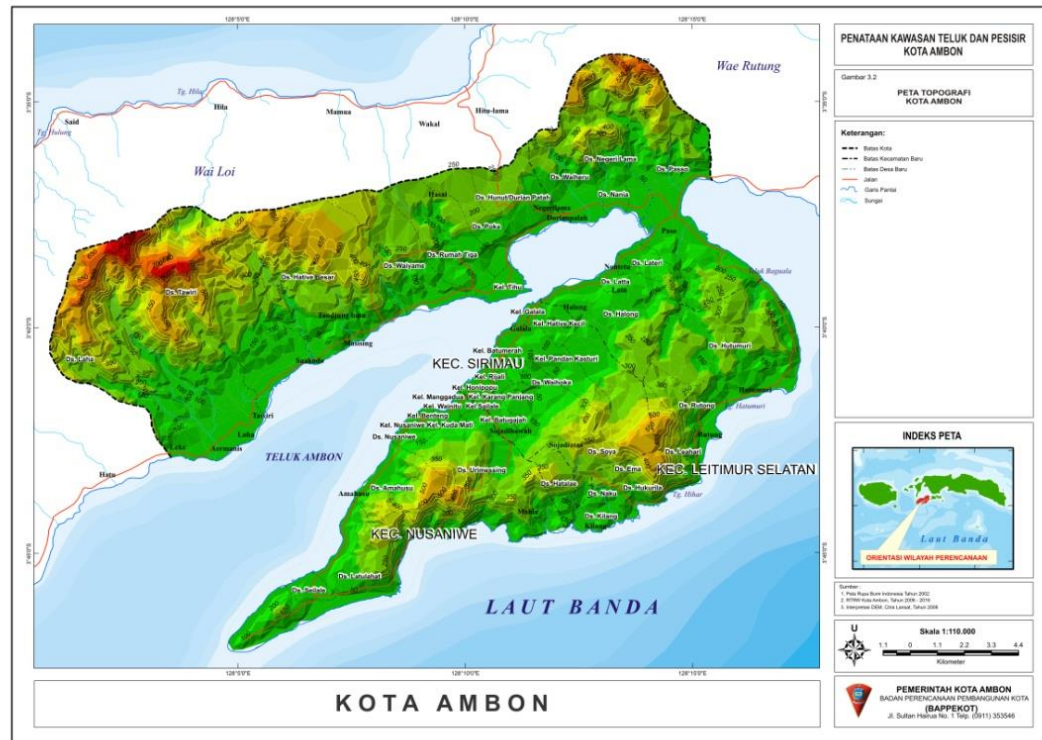
Kota Ambon terletak di Pulau Ambon adalah bagian dari kepulauan Maluku yang merupakan pulau-pulau busur vulkanis, sehingga secara umum Kota Ambon memiliki wilayah yang sebagian besar terdiri dari daerah berbukit dan berlereng.

Kondisi topografi wilayah Kota Ambon, meliputi wilayah daratan berbukit sampai berlereng terjal dengan kemiringan di atas 20%, sebesar 73% wilayah; sedangkan wilayah daratan lainnya yang cenedrung datar atau landai dengan kemiringan kurang dari 20% sebesar 17% wilayah; serta sisa sekitar 10% adalah pantai, pesisir dan teluk (Gambar II.2).

Keadaan topografi Kota Ambon secara umum dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- 1) Topografi relatif datar dengan ketinggian 0-100 meter dan kemiringan 0-10% terdapat di kawasan sepanjang pantai dengan radius antara 0-300 meter dari garis pantai.
- 2) Topografi landai sampai miring dengan ketinggian 0-100 meter dan kemiringan 10-20% terdapat pada kawasan yang lebih jauh dari garis pantai (100 meter kearah daratan).
- 3) Topografi bergelombang dan berbukit terjal dengan ketinggian 0-100 meter dan kemiringan 20-30% terdapat pada kawasan perbukitan.

- 4) Topografi terjal dengan ketinggian lebih dari 100 meter dan kemiringan lebih dari 30% terdapat pada kawasan pegunungan.



Sumber: BAPPEKOT Kota Ambon, 2014

**Gambar II.2. Peta Topografi Kota Ambon**

### 3. Iklim

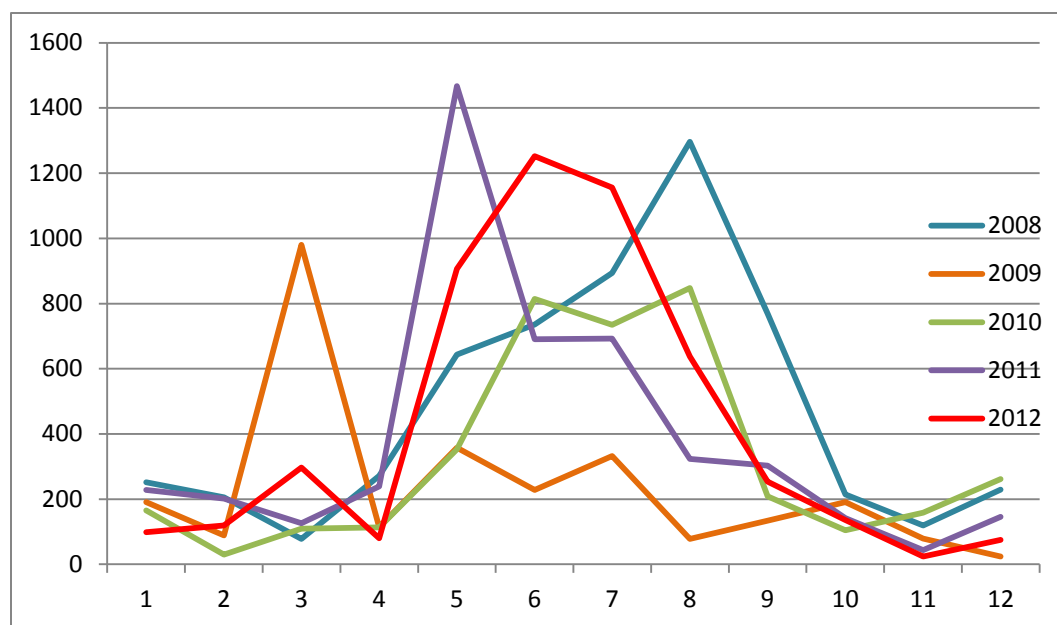
Kota Ambon dipengaruhi oleh 2 iklim yaitu Iklim Tropis dan Iklim Musim. Kota Ambon dipengaruhi oleh iklim tropis karena letaknya di sekitar Garis Katulistiwa, dengan penyinaran matahari sepanjang tahun. Kota Ambon dipengaruhi oleh iklim Musim karena berada dikelilingi lautan yang dapat mengalami perubahan tekanan udara.

Iklim musim yang terjadi adalah musim Barat atau Utara; dan musim Timur atau Tenggara. Pergantian musim selalu diselingi oleh musim Pancaroba yang merupakan transisi dari kedua musim tersebut. Musim Barat umumnya berlangsung dari bulan Desember sampai bulan Maret, dimana bulan April merupakan masa transisi ke musim Timur. Sedangkan musim Timur berlangsung dari bulan Mei sampai bulan Oktober, dimana bulan Nopember merupakan masa transisi ke musim Barat.

Klasifikasi iklim di Kota Ambon tergolong tipe iklim B menurut Schmidh dan Ferguson (1951), yang dicirikan oleh rata-rata bulan kering (curah hujan < 60 mm) adalah 1,67 bulan dan bulan basah (curah hujan > 100 mm) adalah 9,58 bulan dengan nilai Q sebesar 17,4%.

Selama tahun 2008 - 2012, curah hujan tahunan tertinggi di Kota Ambon terjadi pada tahun 2012 yaitu sebesar 5.041,2mm dengan 226 hari hujan (Gambar II.3). Rata-rata bulan basah (musim hujan) dengan curah hujan

di atas 200 mm terjadi pada bulan Maret, Mei hingga September, seiring dengan berlangsung Musim Timur dengan curah hujan tertinggi di bulan Juni (1.252,1mm). Pada sisi lain, rata-rata bulan kering (musim panas) dengan curah hujan di bawah 200 mm, terjadi dari bulan Oktober hingga Maret seiring dengan berlangsungnya Musim Barat, dengan curah hujan terendah di bulan November (24,5mm).



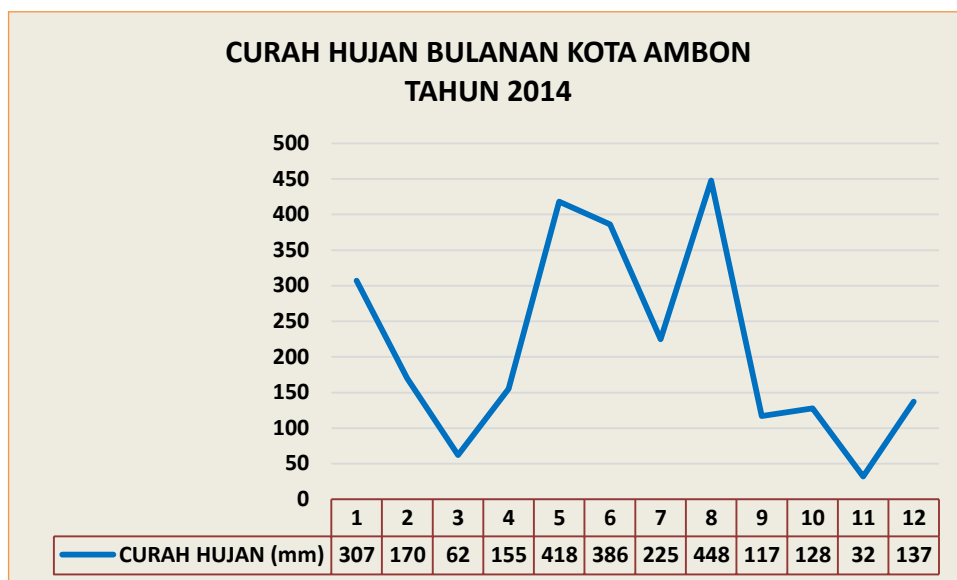
Sumber: Stasiun Meteorologi Ambon melalui BPS tahun 2013

Gambar II.3. Curah Hujan di Kota Ambon Tahun 2008 - 2012

Data Stasiun Meteorologi Ambon mencatat bahwa antara tahun 2008-2012, suhu di Kota Ambon rata-rata adalah 26,2°C, dengan kisaran suhu minimum adalah 23,7°C dan suhu maksimum 29,7°C. Pada sisi lain, rata-rata kelembaban nisbi adalah 86%, rata-rata lama penyinaran matahari adalah 54,6% dan rata-rata tekanan udara adalah 1.009,8 MB.

Selama tahun 2014, curah hujan bulanan tertinggi di Kota Ambon terjadi pada bulan Agustus yaitu sebesar 448 mm dengan 30 hari hujan (Gambar II.4). Penyinaran matahari tertinggi terjadi pada bulan Nopember sebesar 83%. Pada sisi lain, rata-rata bulan basah (musim hujan) dengan curah hujan di atas 200 mm terjadi pada bulan Januari, Mei hingga Agustus seiring dengan berlangsungnya Musim Timur, sedangkan bulan kering (musim panas) dengan curah hujan di bawah 200 mm terjadi dari bulan Pebruari sampai April dan September sampai bulan Desember seiring dengan berlangsungnya Musim Barat, dimana curah hujan terendah di bulan November (32 mm) dengan 10 hari hujan.

Pada Tahun 2014, suhu rata-rata di Kota Ambon adalah 27,5°C dengan kisaran suhu minimum adalah 23,0°C dan suhu maksimum adalah 32,6°C. Rata-rata kelembaban nisbi adalah 83,6%; rata-rata lama penyinaran matahari adalah 58,6%, dan rata-rata tekanan udara adalah 1.011,4 MB.



Sumber: Stasiun Meteorologi Ambon tahun 2015

Gambar II.4. Curah Hujan di Kota Ambon Tahun 2014

#### 4. Kondisi Hidrologi

Sesuai dengan kondisi topografi Kota Ambon di pulau kecil, maka sungai-sungai di Kota Ambon memiliki karakter khusus yang terdiri dari banyak sungai kecil dengan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang tidak luas dan sempit (Tabel II.2). Sungai-sungai yang mengalir umumnya tidak panjang. Sungai terpanjang adalah Way Sikula di Desa Laha dengan panjang mencapai 15,5 km, sedangkan sungai terpendek adalah Way Tomu dan Way Batu Gajah dengan panjang 1,5 km yang mengalir di pusat Kota Ambon.

Tabel II.2. Daerah Aliran Sungai di Kota Ambon

No.	Nama DAS	Luas (Ha)
<b>1</b>	<b>Wilayah DAS Wae Batu Merah</b>	<b>7940,27</b>
	a. DAS Wae Tomu	564,00
	b. DAS Wae Batu Gajah	545,75
	c. DAS Wae Batu Gantung	1.729,32
	d. DAS Wairuhu	1.080,00
	e. Area Penggunaan Lain (APL)	4.021,20
<b>2</b>	<b>Wilayah DAS Wae Pia Besar</b>	<b>13.609,29</b>

Sumber: Program Studi Ilmu Tanah Universitas Pattimura, 2012

Di Kota Ambon terdapat 2 wilayah DAS, yaitu DAS Wae Batu Merah di jazirah selatan Kota Ambon, dan DAS Wae Pia Besar di jazirah utara Kota Ambon. Pada Wilayah DAS Wae Batu Merah (Tabel II.2), yang meliputi sungai-sungai di kawasan Pusat Kota Ambon, saat ini telah mengalami penurunan fungsi, menjadi Area Penggunaan Lain (APL) untuk budidaya, khususnya permukiman, jalan, atau kebun campuran. Luas APL pada Wilayah DAS Wae Batu Merah mencapai 4.021,20 Ha atau 50,64%. Hal ini telah memberikan dampak pada penurunan debit air baku pada sungai-

sungai utama, yang jika tidak diantisipasi, dapat berdampak buruk di kemudian hari.

Selain penurunan fungsi DAS menjadi APL, sungai-sungai utama di Wilayah DAS Wae Batu Merah, seperti Wae Batu Gantung, Wae Batu Gajah, Wae Tomu, Wae Batu Merah, dan Wae Ruhu berada pada permukiman perkotaan yang padat, sehingga sering memiliki sanitasi lingkungan yang tidak sehat, seperti sampah, dan limbah domestik yang tidak terkelola.

Sementara itu, ketersediaan air tanah di Kota Ambon dapat dikelompokkan atas: (1) ketersediaan rendah yang umumnya berada di perbukitan; (2) ketersediaan sedang di dataran rendah dan pesisir; serta (3) ketersediaan tinggi di beberapa tempat tertentu seperti di Negeri Tawiri, Desa Waiheru, pesisir Negeri Hutumuri, Negeri Rutong, dan Negeri Urimesing. Sepanjang pesisir merupakan daerah dengan akuifer berproduksi baik, namun bukan merupakan daerah resapan yang potensial, sehingga ketersediaan air tanahnya adalah sedang.

## **5. Penggunaan Lahan**

Penggunaan lahan di kota Ambon dilaksanakan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Ambon Tahun 2011-2031, yang secara substantif terdiri dari Rencana Struktur Ruang Kota Wilayah Kota Ambon, dan Rencana Pola Ruang Wilayah Kota Ambon.

Rencana struktur ruang wilayah Kota Ambon antara lain meliputi Sistem Pusat Pelayanan Kegiatan Kota dan rencana pengembangannya, meliputi:

- a. Pusat Kota Ambon sebagai sentra primer, direncanakan melayani seluruh wilayah Kota Ambon, terutama SWP I; akan terus dikembangkan sebagai pusat penyelenggaraan pemerintahan provinsi maupun kota, perdagangan, jasa keuangan, perhubungan darat dan laut, industri perikanan, dan aneka industri, pariwisata, kesehatan, dan pendidikan, terutama untuk mendukung fungsi Kota Ambon sebagai PKN dan pelabuhan internasional.
- b. Negeri Passo sebagai sentra sekunder I, direncanakan melayani wilayah Kota Ambon bagian Timur, terutama SWP II; akan terus dikembangkan sebagai pusat pemerintahan kecamatan, perdagangan, perhubungan darat dan laut, aneka industri, kesehatan, pendidikan kejuruan, pariwisata, dan permukiman, terutama dalam mengurangi tekanan penduduk terhadap Pusat Kota Ambon;
- c. Desa Wayame sebagai sentra sekunder II, direncanakan melayani SWP III; akan terus dikembangkan sebagai pusat pendidikan tinggi, ilmu pengetahuan dan teknologi, permukiman, pemerintahan kecamatan, aneka industri, pertanian tanaman pangan dan hortikultura, serta perikanan;

- d. Negeri Amahusu sebagai Sentra tersier I, dan Negeri Latuhalat sebagai sentra tersier IV, direncanakan melayani SWP V; akan terus dikembangkan sebagai pusat pemerintahan kecamatan, industri rumah tangga, perikanan, perkebunan, peternakan, pariwisata, dan pemukiman;
- e. Negeri Leahari-Rutong sebagai sentra tersier II, direncanakan melayani SWP IV; akan terus dikembangkan sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pertanian hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, pendidikan kejuruan, permukiman, dan pariwisata; ; serta
- f. Negeri Tawiri-Laha, sebagai sentra tersier III, direncanakan membantu pelayanan kawasan khusus Bandar udara; akan terus dikembangkan sebagai kawasan pengamanan keselamatan penerbangan dan pelayanan bandara distribusi tersier, disamping sebagai pusat pertanian tanaman pangan, perikanan, industri jasa maritim, dan pertambangan bahan galian golongan C.

Sementara itu, Rencana Pola Ruang Wilayah Kota Ambon meliputi rencana pola ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya.

Rencana pola ruang kawasan lindung meliputi: (a) kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya; (b) kawasan perlindungan setempat; (c) kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH); (d) kawasan pelestarian alam; (e) kawasan rawan bencana; (f) kawasan lindung geologi; dan (g) kawasan lindung lainnya.

Rencana pola ruang kawasan budidaya meliputi: (a) kawasan permukiman/ dan atau perumahan; (b) kawasan perdagangan dan jasa; (c) kawasan perkantoran; (d) kawasan industri kecil dan menengah; (e) kawasan pariwisata; (f) kawasan ruang terbuka non hijau; (g) kawasan ruang evakuasi bencana; (h) kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal; dan (i) kawasan peruntukan lainnya.

#### **6. Kerawanan terhadap Bencana**

Berdasarkan RTRW Kota Ambon Tahun 2011-2015, Kawasan rawan bencana di Kota Ambon meliputi: (1) kawasan rawan gempa, dan gerakan tanah, (2) kawasan rawan longsor, (3) kawasan rawan banjir, dan (4) kawasan rawan gelombang pasang dan tsunami.

Kawasan rawan gempa, dan gerakan tanah meliputi wilayah Kota Ambon. Kawasan rawan longsor meliputi Negeri Hukurila, Negeri Soya, Negeri Hatalai, Negeri Ema, Negeri Kilang, Negeri Naku, Dusun Mahia, Dusun Tuni Negeri Amahusu, Negeri Batu Merah, Negeri Hative Besar, dan Negeri Nusaniwe. Kawasan rawan banjir meliputi sepanjang bantaran sungai Wairuhu, Wai Batu Merah, Waitomu, Wai Batu Gajah, Wai Batu

Gantung, Wayame, dan Wailela. Kawasan rawan gelombang pasang dan tsunami meliputi kawasan pesisir Kota Ambon.

Kondisi topografi yang berbukit-bukit di pulau yang kecil, menyebabkan Kota Ambon sangat rawan terhadap bencana alam banjir dan longsor ketika musim hujan. Selain itu keterbatasan lahan datar untuk permukiman, menyebabkan kawasan atas dan perbukitan yang semula adalah kawasan hijau, telah digunakan untuk permukiman, yang turut memicu kerentanan terhadap longsor dan banjir, dan berkurangnya debit air permukaan pada musim panas.

Selain itu, melihat trend musim hujan dalam 3 tahun belakangan, maka pada tahun 2012 dan 2013, terjadi bencana alam banjir dan longsor dalam skala besar ketika musim hujan, yaitu tanggal 1 Agustus 2012, dan 30 Juli 2013. Namun demikian, pada tahun 2014, bencana banjir dan longsor seperti dua tahun sebelumnya tidak terjadi.

Berdasarkan data jumlah curah hujan tahunan dari Stasiun Meteorologi Pattimura Ambon, maka pada tahun 2012 curah hujan tahunan Kota Ambon adalah 5.041,2 mm. Jumlah curah hujan tahun 2012 ini merupakan curah hujan tertinggi dalam 10 tahun terakhir. Sedangkan curah hujan tahunan tahun 2014 adalah 2.585 mm. Kondisi curah hujan yang demikian dapat menunjukkan bahwa perubahan iklim global sudah mulai terasa di Kota Ambon, sehingga sudah harus diantisipasi dari sekarang.

#### **b. Kondisi Demografi**

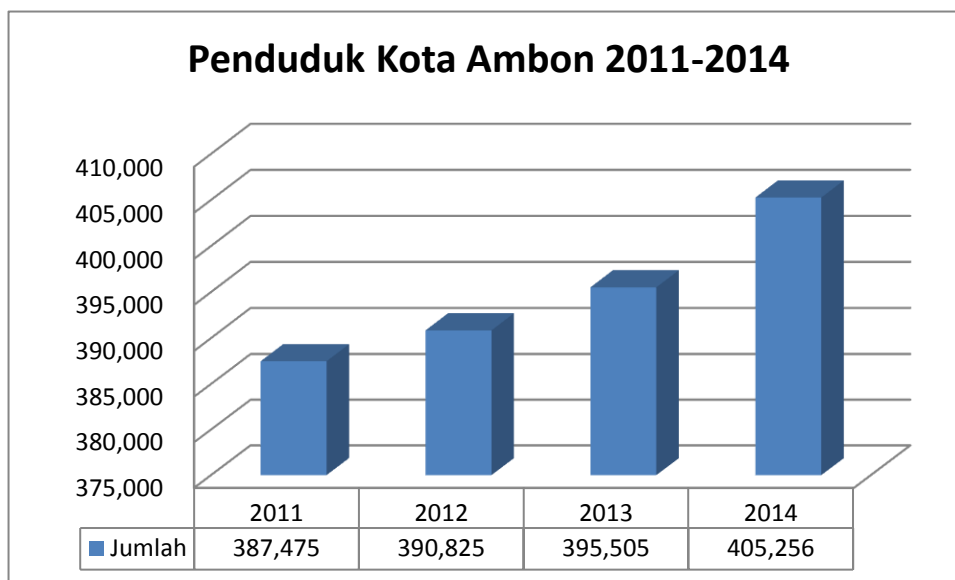
Sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) di Propinsi Maluku, Kota Ambon berkembang sangat dinamis, sehingga turut berpengaruh terhadap dinamika jumlah penduduk.

##### **1. Jumlah, Pertumbuhan, dan Kepadatan Penduduk**

Selama kurun waktu 4 tahun terakhir perkembangan jumlah penduduk Kota Ambon cenderung meningkat dari tahun ke tahun, seperti Gambar II.5.

Sesuai data base Kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon, jumlah penduduk Kota Ambon tahun 2014 sebanyak 405.256 jiwa (Gambar II.5). Ini berarti terjadi pertumbuhan sebesar 2,47% dari jumlah Penduduk tahun 2013 yang sebesar 395.505 jiwa. Pertumbuhan penduduk tahun 2014 tersebut, adalah diatas rata-rata pertumbuhan penduduk tahun 2012-2014 sebesar 1,51%.





Gambar II.5. Jumlah Penduduk Kota Ambon Tahun 2011 – 2014

Jumlah penduduk tersebut tersebar pada 5 kecamatan, dimana Kecamatan Sirimau memiliki penduduk terbanyak yaitu 166.398 jiwa (41,06%) dengan kepadatan 1.917 jiwa/km<sup>2</sup>. Pada sisi lain, Kecamatan Leitimur Selatan memiliki jumlah penduduk terkecil dengan kepadatan terendah yaitu 10.687 jiwa (2,64%) dengan kepadatan 212 jiwa/km<sup>2</sup> (Tabel II.3, dan Tabel II.4)). Kepadatan penduduk di Kota Ambon tahun 2014 adalah 1.127 jiwa/km<sup>2</sup>.

Tabel II.3. Distribusi Penduduk Kota Ambon Berdasarkan Kecamatan Tahun 2012 – 2014

No	Kecamatan	Penduduk (jiwa)			
		2011	2012	2013	2014
1	Nusaniwe	108.383	113.142	113.575	116.237
2	Sirimau	160.858	160.808	163.009	166.398
3	Teluk Ambon Baguala	61.253	56.921	57.728	59.168
4	Teluk Ambon	47.173	49.647	50.673	52.766
5	Leitimur Selatan	9.808	10.280	10.520	10.687
<b>Kota Ambon</b>		<b>387.475</b>	<b>390.825</b>	<b>395.505</b>	<b>405.256</b>
<b>Pertumbuhan (%)</b>		-	<b>0,86</b>	<b>1,20</b>	<b>2,47</b>
<b>Pertumbuhan 2012-2014 (%)</b>		<b>1,51</b>			

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon 2015

Tabel II.4. Kepadatan Penduduk Tiap Kecamatan Tahun 2014

No	Kecamatan	Luas Wilayah Daratan (Km <sup>2</sup> )	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/ Km <sup>2</sup> )
1	Nusaniwe	88,35	116.237	1.316
2	Sirimau	86,81	166.398	1.917
3	T.A.Baguwala	40,11	59.168	1.475
4	Teluk Ambon	93,68	52.766	563
5	Leitimur Selatan	50,50	10.687	212
<b>Kota Ambon</b>		<b>359,45</b>	<b>395.505</b>	<b>405.256</b>

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon, 2015

## 2. Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Penduduk Kota Ambon bila diklasifikasikan menurut jenis kelamin, sesuai Data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon, tahun 2014 menunjukkan bahwa dari 405.256 jiwa penduduk, terdapat laki-laki sebanyak 202.353 jiwa (49,93%) dan perempuan sebanyak 202.903 jiwa (50,07%), yang tersebar pada 5 Kecamatan seperti pada Tabel II.5.

Tabel II.5. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Tiap Kecamatan Tahun 2014

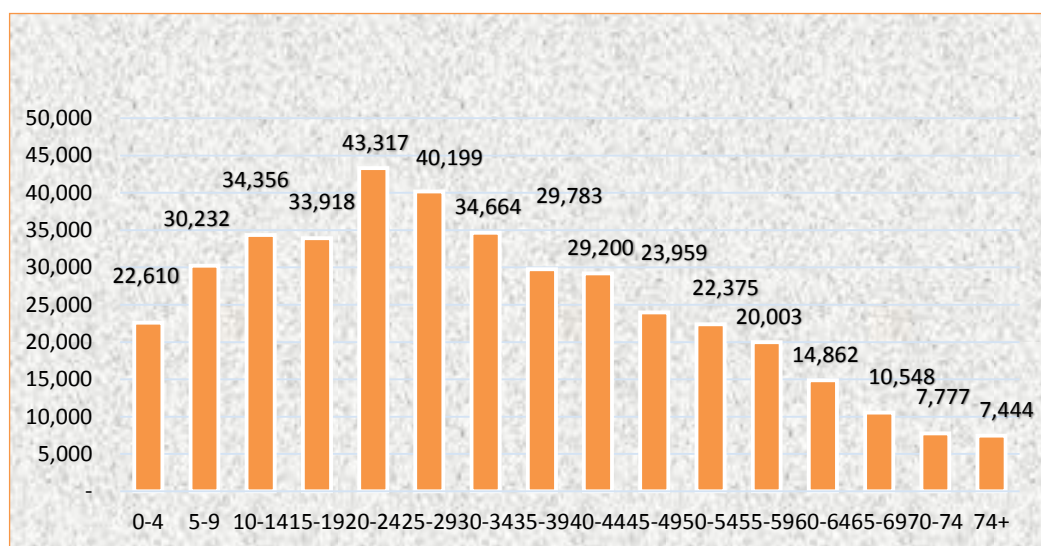
No	Kecamatan	Laki-Laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1	Nusaniwe	57.602	58.635	<b>116.237</b>
2	Sirimau	83.402	82.996	<b>166.398</b>
3	T.A.Baguwala	29.415	29.753	<b>59.168</b>
4	Teluk Ambon	26.604	26.162	<b>52.766</b>
5	Leitimur Selatan	5.330	5.357	<b>10.687</b>
<b>Kota Ambon</b>		<b>202.353</b>	<b>202.903</b>	<b>405.256</b>

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon, 2014

## 3. Komposisi Penduduk Menurut Struktur Usia

Dilihat dari struktur usia (Gambar II.6), Penduduk Kota Ambon tahun 2014 yang berjumlah 405.256, lebih didominasi oleh penduduk usia produktif (usia 15 sampai 59 tahun) sebanyak 277.418 jiwa (68,46%), diikuti oleh penduduk usia muda (usia 0 sampai 14 tahun) sebanyak 87.207 jiwa (21,52%), dan usia lanjut (usia 60 tahun ke atas) sebanyak 40.631 jiwa (10,02%).

Penduduk usia produktif yang sebesar 68,46% adalah berpotensi untuk bekerja dan produktif, dalam menunjang perekonomian keluarga, sekaligus penggerak perekonomian Kota Ambon. Pada usia produktif ini, potensi penduduk terbanyak adalah berusia 20 – 24 tahun sebanyak 43.317 orang, dan berusia 25 – 29 tahun ssebanyak 40.199 orang atau seluruhnya sebesar 20,61%, yang umumnya sudah selesai SMA/SMK/MA, dan bekerja atau melanjutkan ke Perguruan Tinggi yang tersebar di Kota Ambon.



Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon Tahun 2015

Gambar II.6. Struktur Usia Penduduk Kota Ambon Tahun 2014

### 2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

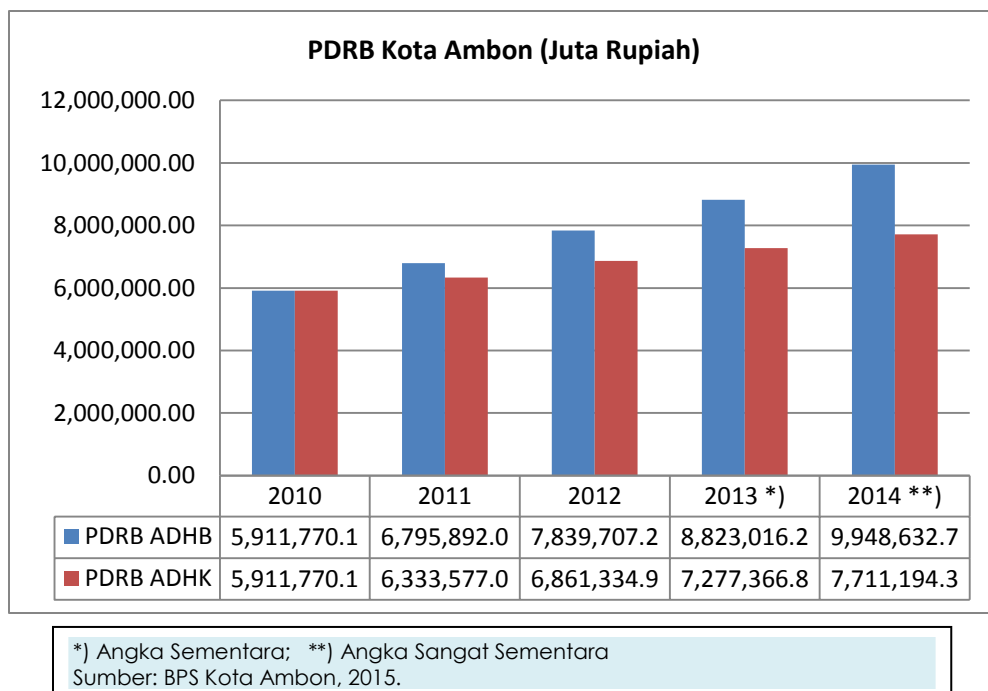
Kondisi kesejahteraan masyarakat di Kota Ambon mencakup aspek kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, seni budaya dan olah raga

#### a. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Aspek kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, tergambar dalam:

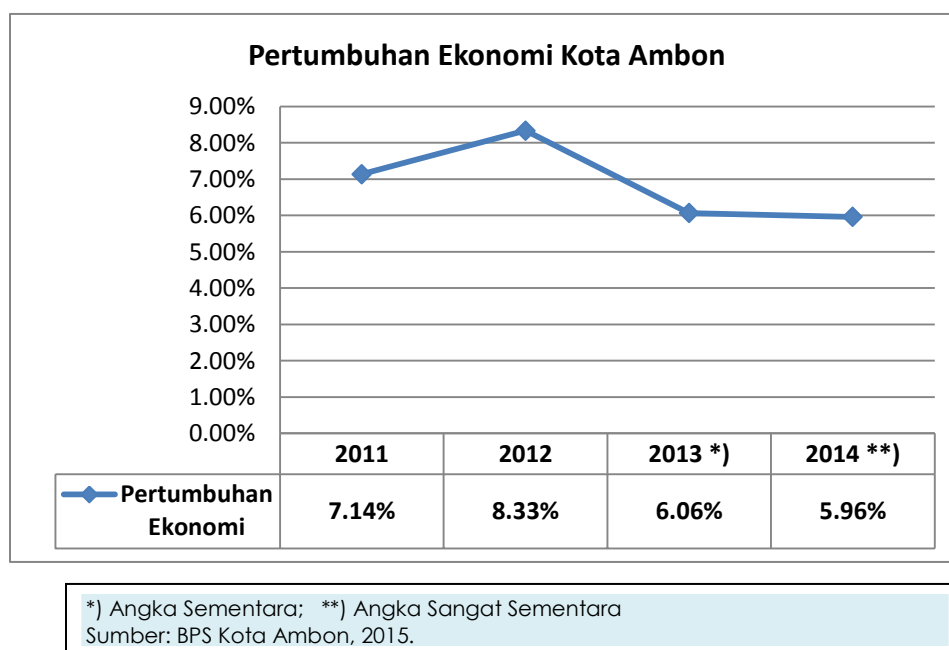
##### 1. Pertumbuhan PDRB

Mulai tahun 2015, perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) oleh Badan Pusat Statistik menggunakan tahun dasar 2010, dimana sebelumnya menggunakan tahun dasar 2000. Karena itu data PDRB Kota Ambon tahun 2010 sampai 2014 yang digunakan sekarang telah menggunakan tahun dasar 2010, yang mengalami penyempurnaan dalam konsep dan defenisi, termasuk juga perubahan cakupan untuk setiap 'sektor', dimana istilah yang digunakan sekarang bukan lagi 'sektor' tapi 'kategori'.



Gambar II.7. PDRB Kota Ambon Tahun 2010-2014

Perhitungan Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, ekonomi Kota Ambon yang diukur dengan besaran PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) maupun Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 (ADHK 2010) terus mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa geliat aktivitas perekonomian di Kota Ambon menunjukkan pertumbuhan yang berkembang maju (Gambar II.7)

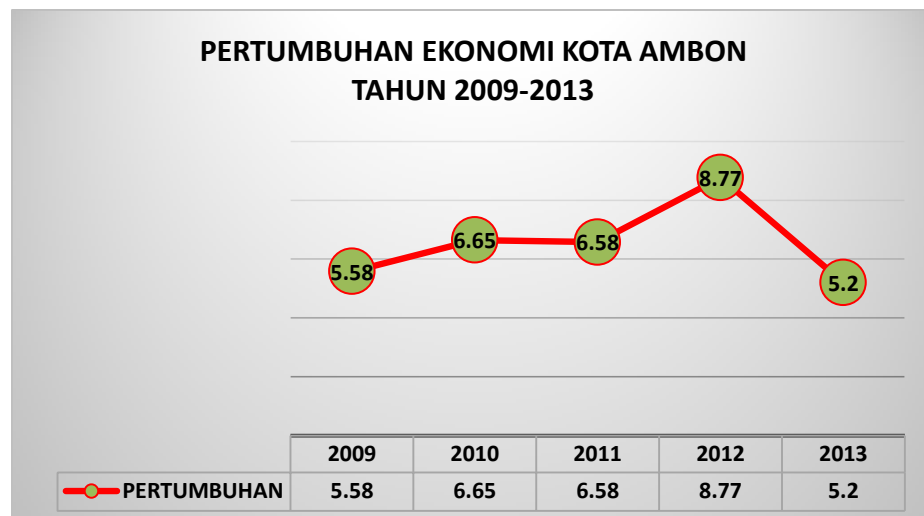


Gambar II.8. Pertumbuhan Ekonomi Kota Ambon Tahun 2011-2014 (ADHK Tahun 2010)

Pada tahun 2014, PDRB Kota Ambon atas dasar Harga Berlaku mencapai Rp.9,948 trilyun lebih, atau meningkat sebesar Rp.1,125 triliun lebih (12,76%) dibanding tahun 2013 yang sebesar Rp.8,823 trilyun lebih. Sementara itu, PDRB Kota Ambon tahun 2014 atas dasar Harga Konstan (tahun 2010) mencapai Rp.7,711 trilyun lebih. PDRB atas dasar Harga Konstan ini meningkat sebesar Rp.433,8 milyar lebih (5,96%) dibanding tahun 2013 yang adalah Rp.7,277 trilyun lebih.

Mengacu kepada pertumbuhan PDRB (atas dasar harga konstan 2010), maka pertumbuhan ekonomi Kota Ambon terus mengalami pertumbuhan positif dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, meskipun dalam 2 tahun terakhir cenderung melambat dari tahun 2012 (Gambar II.8).

Jika mengacu pada PDRB ADHK tahun 2000, maka trend pertumbuhan ekonomi ADHK 2000 juga seirama dengan PDRB ADHK tahun 2014 (ADHK 2010) (Gambar II.9). Pada tahun 2009 pertumbuhan ekonomi Kota Ambon adalah sebesar 5,58 persen, melambat pada tahun 2009 yaitu 5,58 persen, meningkat di tahun 2010 menjadi 6,65 persen dan berfluktuasi sampai tahun 2013 berada pada tingkat pertumbuhan 5,20 persen. Pertumbuhan tercepat selama kurun waktu 5 tahun adalah di tahun 2012 sebesar 8,77 persen dimana seluruh sektor ekonomi di Kota Ambon mengalami pertumbuhan positif. Tingginya pertumbuhan ekonomi di tahun 2012, sangat dipengaruhi oleh masuknya investasi Pemerintah melalui sector Jasa-Jasa, khususnya sub sector Pemerintahan Umum dan Pertahanan terhadap pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Nasional di Kota Ambon.



Sumber: BPS Kota Ambon, 2014

Gambar II.9. Pertumbuhan Ekonomi Kota Ambon Tahun 2009-2013 (ADHK Tahun 2000)

## 2. Laju Inflasi

Inflasi merupakan suatu keadaan yang mengindikasikan semakin lemahnya daya beli masyarakat yang diikuti dengan semakin lemahnya/merosotnya nilai riil mata uang suatu Negara. Inflasi memberikan indikasi adanya kenaikan harga-harga secara umum dan terus menerus selama periode tertentu, meskipun kenaikan harga-harga tersebut tidak secara bersamaan.

Tabel II.6. Inflasi Kota Ambon Tahun 2010-2014  
Dirinci Per Bulan

No.	Bulan	Laju Inflasi Indeks Umum (%)				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	Januari	3,23	-0,83	1,62	1,81	0,81
2	Pebruari	-0,65	0,04	1,31	-2,29	0,85
3	Maret	0,27	-0,46	1,33	0,79	0,64
4	April	-0,51	0,09	0,79	0,27	0,92
5	Mei	-0,07	1,66	0,06	2,25	0,40
6	Juni	0,85	3,76	2,39	-0,15	0,18
7	Juli	1,28	-1,20	1,70	4,30	0,14
8	Agustus	2,40	0,83	0,19	4,79	0,12
9	September	0,95	-0,40	-1,87	-0,92	-0,26
10	Oktober	-0,29	-0,67	-2,44	-3,82	0,15
11	Nopember	-0,24	-0,34	0,63	0,53	0,82
12	Desember	1,30	0,43	0,94	1,51	1,85
<b>Laju Inflasi Kumulatif</b>		<b>8,78</b>	<b>2,85</b>	<b>6,73</b>	<b>8,81</b>	<b>6,81</b>

Sumber: BPS Kota Ambon, 2015.

Laju inflasi di Kota Ambon beragam selama tahun 2014 (Tabel II.6). Laju inflasi tertinggi di Kota Ambon terjadi pada bulan Desember (1,85%), disusul bulan April sebesar (0,92%), sedangkan terendah terjadi pada bulan September sebesar (-0,26%). Pada Desember 2013, Kota Ambon mengalami inflasi umum sebesar (1,85%). Inflasi tersebut ditandai dengan kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) Umum Kota Ambon dari 112,95% pada bulan November 2014 menjadi 115,04% pada bulan Desember 2014.

Tabel diatas menggambarkan perkembangan laju inflasi sejak tahun 2010 sampai 2014, dimana laju inflasi kumulatif tertinggi terjadi pada tahun 2013 sebesar 8,81%, disusul tahun 2010 sebesar 8,78%, sedangkan terendah sebesar 2,85% terjadi pada tahun 2011.

Inflasi Kumulatif bulan Desember 2014 sebesar (6,81%), ditandai dengan menurunnya IHK Kota Ambon pada bulan Desember 2013 yaitu 153,14% menjadi 115,04% pada bulan Desember 2014 sedangkan Inflasi Year On Year sebesar 6,81%. Jika dibandingkan dengan 18 kota di Kawasan Timur Indonesia, maka Kota Ambon untuk IHK Umum berada pada rangking ke 2 (di bawah Kota Gorontalo, diatas Kota Manokwari); untuk Laju Inflasi bulan Desember 2014 berada pada rangking ke 4 (di bawah Kota

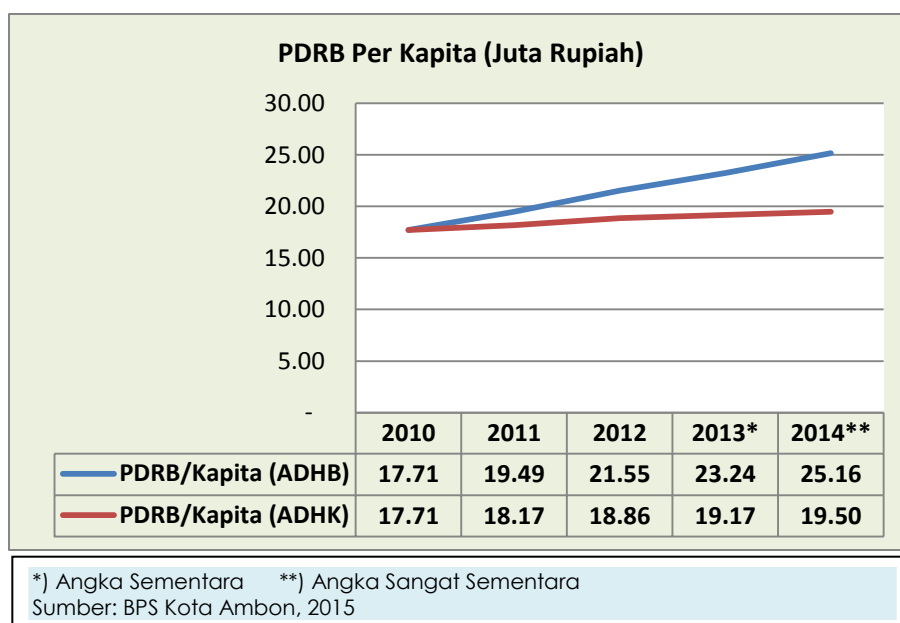
Manokwari); serta untuk Laju Inflasi Kumulatif dan Laju Inflasi Year on Year pada ranking ke 3 di bawah Kota Gorontalo. Secara Nasional, maka IHK Umum Kota Ambon berada pada ranking ke 77 dibawah Kota Gorontalo dan di atas Kota Banda Aceh; untuk Laju Inflasi bulan Desember 2014 berada pada ranking ke 73; serta untuk Laju Inflasi Kumulatif dan Laju Inflasi Year on Year berada pada ranking ke 73 dari 80 Kota di Indonesia.

### 3. PDRB Per Kapita

Keberhasilan pembangunan di berbagai bidang sangat berpengaruh pada pendapatan regional per kapita di Kota Ambon. Selain itu, upaya-upaya Pemerintah Kota Ambon untuk mengembangkan program-program unggulan dan pendekatan penguatan ekonomi masyarakat juga sangat berimplikasi pada peningkatan pendapatan masyarakat, dan hal ini terlihat jelas dari adanya peningkatan pendapatan domestik regional per kapita di Kota Ambon.

Pendapatan domestik regional per kapita tahun 2014 di Kota Ambon berdasarkan Harga Konstan Tahun 2010 adalah Rp.19,50 juta, meningkat sekitar Rp.330.000- (1,73%) dari tahun sebelumnya. Sedangkan berdasarkan Harga Berlaku adalah Rp.25,16 juta,- meningkat sekitar Rp.1,92 juta (8,25%) dari tahun sebelumnya (Gambar II.10).

Secara riil pendapatan yang diterima penduduk Kota Ambon tahun 2014 adalah sebesar Rp.19,50,- juta (ADHK), yang dihitung berdasarkan kondisi tahun 2010. Dengan demikian dapat diartikan bahwa pendapatan ADHB sebesar Rp.25,16 juta yang diterima setiap penduduk Kota Ambon tahun 2014 adalah setara dengan Rp.19,50 juta pada tahun 2010.



Gambar II.10. Pendapatan Regional Perkapita Kota Ambon Tahun 2010-2014

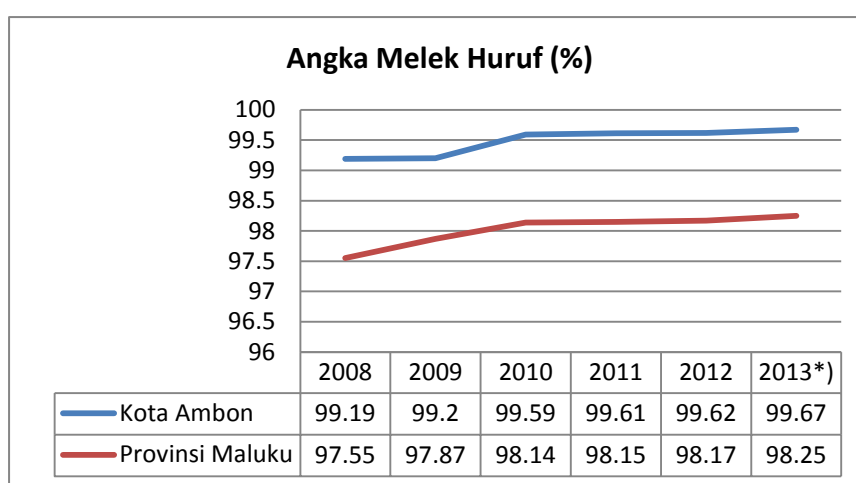
**b. Kesejahteraan Sosial**

Aspek kesejahteraan sosial, tergambar dalam:

**b.1. Pendidikan**

**1. Angka Melek Huruf**

Angka Melek Huruf (dewasa) adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya. Penduduk yang melek huruf di Kota Ambon, selama 6 tahun terakhir terus bertambah, dan sampai tahun 2013 telah berjumlah 99,67%. Angka ini lebih tinggi dari angka rata-rata melek huruf Provinsi Maluku yang sebesar 98,25%. Perkembangan angka melek huruf di Kota Ambon, selama tahun 2008-2013, adalah sebagaimana Gambar II.11.



\*) Data Sementara. Sumber: BPS Kota Ambon, 2015

Gambar II.11. Angka Melek Huruf (%) Kota Ambon dan Provinsi Maluku Tahun 2008-2013

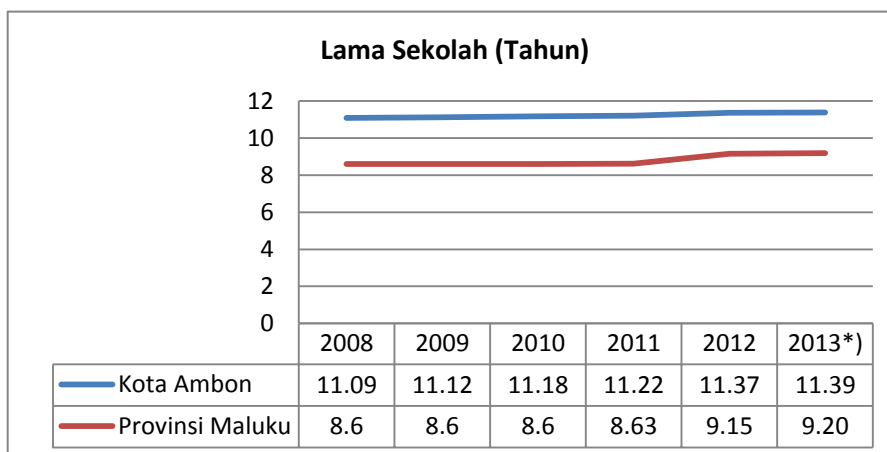
**2. Angka Rata-Rata Lama Sekolah**

Angka rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Lama sekolah penduduk di Kota Ambon terus meningkat dalam 6 tahun terakhir, dan sampai tahun 2013 adalah 11,39 tahun, atau setara sampai dengan Sekolah Menengah Atas. Angka ini lebih tinggi dari angka rata-rata lama sekolah Provinsi Maluku yang sebesar 9,20 tahun. Perkembangan angka lama sekolah di Kota Ambon, selama tahun 2008-2013, adalah sebagaimana Gambar II.12.

**3. Angka Partisipasi Murni**

Angka partisipasi murni adalah perbandingan penduduk usia antara 7 hingga 18 tahun yang terdaftar sekolah pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun. Dengan demikian Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama.





\*) Data Sementara. Sumber: BPS Kota Ambon, 2015

Gambar II.12. Angka Lama Sekolah (Tahun) Kota Ambon dan Provinsi Maluku Tahun 2008-2013

Angka partisipasi murni pada tahun 2011 sampai 2014 meningkat untuk semua jenjang pendidikan (Tabel II.7). Pada tahun 2014, daya serap untuk jenjang SD/MI adalah 95,54%, jenjang SMP/MTs adalah 80,47%, dan jenjang SMA/SMK/MA adalah 72,92%. Berdasarkan Tabel II.7 dapat menggambarkan bahwa makin tinggi jenjang pendidikan, APM semakin berkurang. Berkurangnya APM tidak selamanya menggambarkan berkurangnya daya serap, namun untuk Kota Ambon juga dipengaruhi oleh kecenderungan bahwa anak memulai bersekolah pada jenjang SD/MI adalah dibawah 7 tahun.

Tabel II.7. Angka Partisipasi Murni Jenjang Pendidikan Di Kota Ambon Tahun 2011-2014

No	Jenjang Pendidikan	APM (%)			
		2011	2012	2013	2014
1	SD/ MI	82,98	86,87	95,38	95,54
2	SMP/ MTs	81,81	65,08	79,81	80,47
3	SMA/ MK/MA	65,31	67,02	71,96	72,92

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Ambon, 2015

#### 4. Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun. Dengan demikian APK menggambarkan rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu tersebut.

Tabel II.8. Angka Partisipasi Kasar Jenjang Pendidikan Di Kota Ambon Tahun 2011-2014

No	Jenjang Pendidikan	APK (%)			
		2011	2012	2013	2014
1	SD/ MI	103.62	106.83	106,19	106,41
2	SMP/ MTs	110.15	93,51	90,39	87,88
3	SMA/ MK /MA	101.60	96,14	92,52	85,57

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Ambon, 2015

Angka partisipasi kasar selama kurun waktu 4 tahun terakhir di jenjang SD/MI adalah di atas 100%(Tabel II.8), sedangkan jenjang SMP/MTs dan SMA/MK/MA masih dibawah 90%. Selain dipengaruhi oleh kecenderungan bahwa anak memulai bersekolah pada jenjang SD/MI adalah dibawah 7 tahun, yang menyebabkan APK jenjang SD/MI adalah di atas100%, maka factor lain yang diperkirakan pula mempengaruhi adalah kecenderungan urbanisasi ke Kota Ambon yang memiliki anak yang bersekolah di jenjang SD/

Pada sisi lain, daya serap pada jenjang SMP/MTs dan SMA/MK/MA menunjukkan penurunan. Fenomena ini memerlukan kajian yang lebih dalam lagi, untuk mengetahui penyebabnya dan mencari jalan keluar untuk pemecahannya.

## b.2. Kesehatan

### 1. Angka Kelangsungan Hidup Bayi

Kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. Banyak faktor yang dikaitkan dengan kematian bayi. Secara garis besar, dari sisi penyebabnya, kematian bayi ada dua macam yaitu endogen dan eksogen.

Kematian bayi *endogen* atau yang umum disebut dengan kematian *neo-natal* adalah kematian bayi yang terjadi pada bulan pertama setelah dilahirkan, dan umumnya disebabkan oleh faktor-faktor yang dibawa anak sejak lahir, yang diperoleh dari orang tuanya pada saat konsepsi atau didapat selama kehamilan. Sedangkan Kematian bayi *eksogen* atau kematian *post neo-natal*, adalah kematian bayi yang terjadi setelah usia satu bulan sampai menjelang usia satu tahun yang disebabkan oleh faktor-faktor yang bertalian dengan pengaruh lingkungan luar.

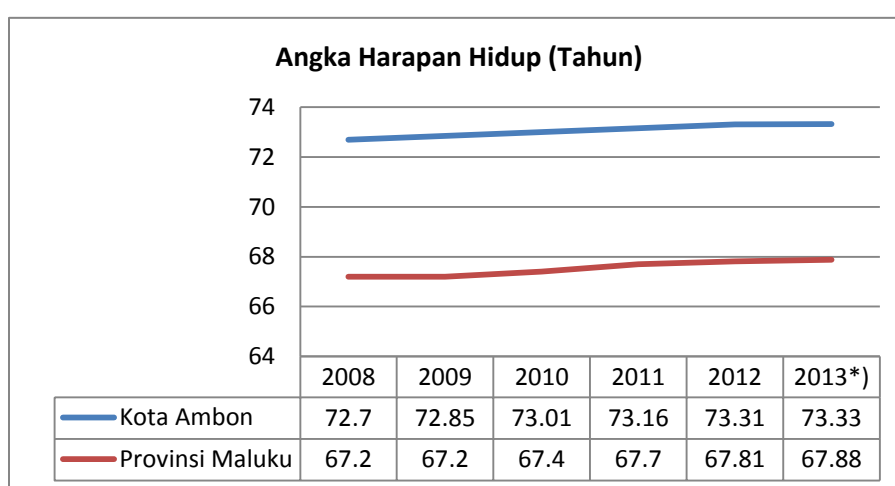
Angka kematian bayi dibawah umur satu tahun di Kota Ambon tahun 2014 adalah 22 bayi atau 3,3/1000 Kelahiran Hidup (KLH). Angka ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 2,1/1000 KLH. Angka kematian bayi Kota Ambon ini masih lebih rendah

dari angka Propinsi Maluku yang sebesar 10/1000 KLH, serta telah memenuhi target MDG's tahun 2015 sebesar 32/1000 KLH.

Pada sisi lain, Angka Kematian Balita (AKB) di Kota Ambon tahun 2014 adalah 6 balita atau 0,9/1000 KLH, lebih rendah dari tahun 2013 sebesar 2,2/1000 KLH. Angka Kota Ambon tahun 2014 ini lebih rendah dari angka Provinsi Maluku sebesar 7,36/1.000 LKH, dan telah memenuhi target MDG's tahun 2015 sebesar 32/1000 KLH.

## 2. Angka Harapan Hidup

Angka usia harapan hidup pada waktu lahir adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur.



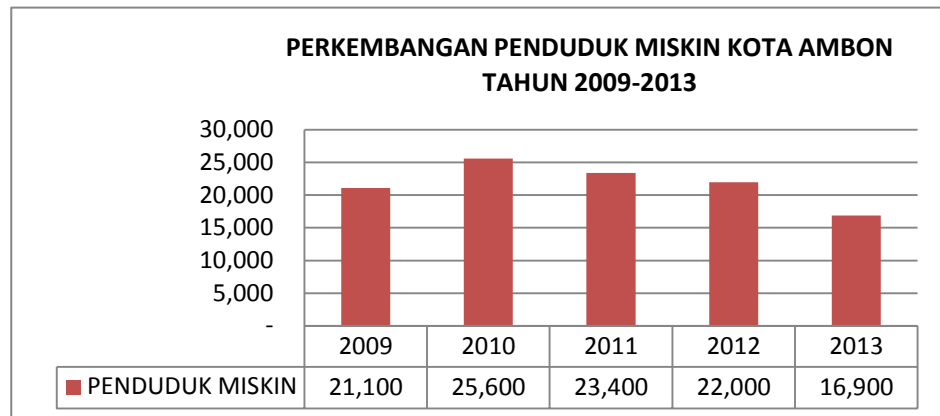
\*) Data Sementara. Sumber: BPS Kota Ambon, 2015

Gambar II.13. Angka Harapan Hidup (Tahun) Kota Ambon dan Provinsi Maluku Tahun 2008-2013

Lama hidup penduduk Kota Ambon, selama 5 tahun terakhir terus mengalami peningkatan, dan sampai tahun 2013 telah menjadi 73.33 tahun. Angka ini lebih tinggi dari angka rata-rata harapan hidup Provinsi Maluku yang sebesar 67,88 tahun. Perkembangan angka harapan hidup di Kota Ambon, selama tahun 2008-2013, adalah sebagaimana Gambar II.13.

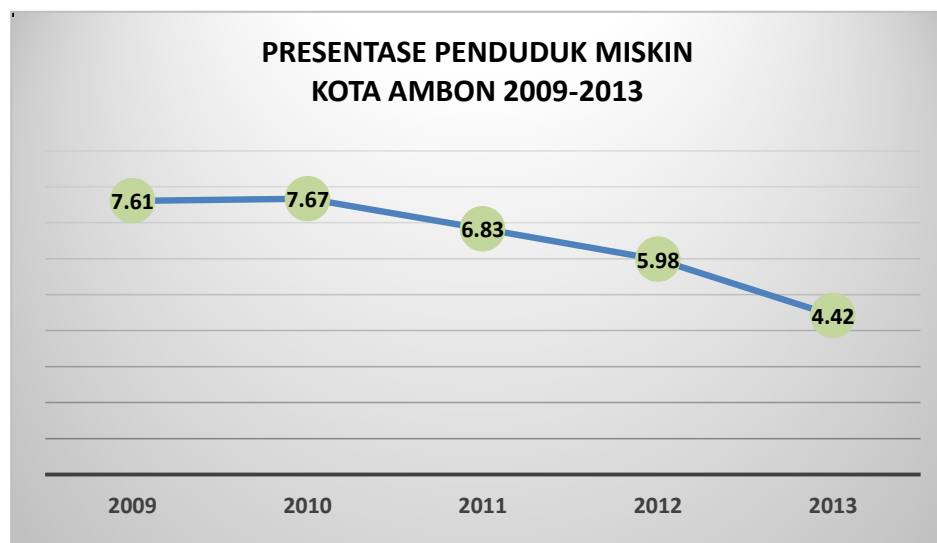
### b.3. Kemiskinan

Penduduk Miskin di Kota Ambon tahun 2013 berdasarkan Data BPS Kota Ambon berjumlah 16.900 jiwa. Jumlah tersebut mengalami penurunan bila dibandingkan dengan jumlah di tahun 2012 sebanyak 22.000 jiwa. Adapun perkembangan jumlah penduduk miskin Kota Ambon sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 seperti gambar II.14.



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Ambon, 2015

Gambar II.14. Penduduk Miskin di Kota Ambon Tahun 2009 – 2013.



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Ambon, 2015

Gambar II.15. Presentase Penduduk Miskin di Kota Ambon Tahun 2009 – 2013

Jika dilihat dalam prosentase, penduduk miskin di Kota Ambon sejak tahun 2009 sampai tahun 2013 adalah seperti pada Gambar II.15, yang menunjukkan trend penurunan. Jika dibandingkan dengan pencapaian MDG's, maka proporsi penduduk miskin Kota Ambon tahun 2013 sebesar 4,42% telah memenuhi dan melampau target MDG's, yang ditargetkan sebesar 7,55% tahun 2015.

Dengan demikian, garis kemiskinan di Kota Ambon sejak tahun 2009 sampai 2013 menunjukkan trend perbaikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2009, garis kemiskinan adalah penduduk dengan pendapatan sebesar Rp.268.913,- per kapita per bulan, mengalami peningkatan sampai 55,36% di tahun 2013 menjadi Rp.417.789,- per kapita per bulan (Gambar II.16).

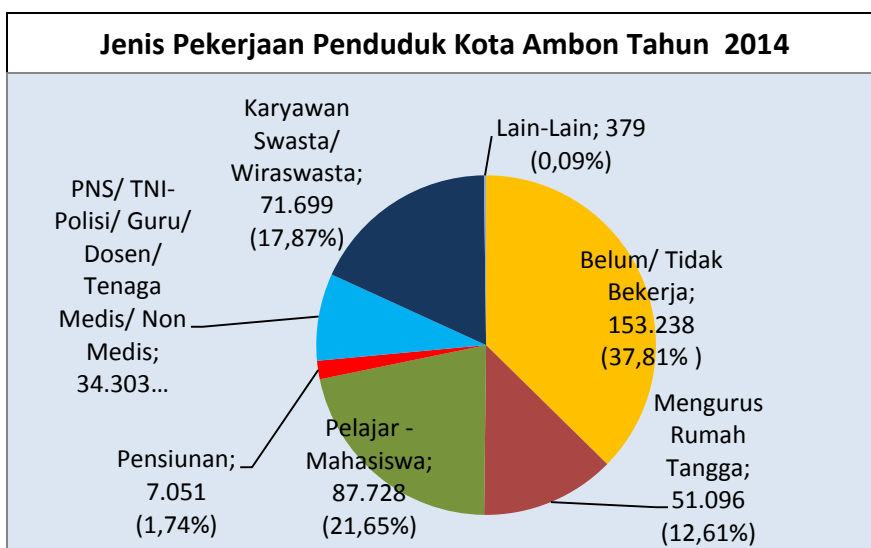


Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Ambon 2014

Gambar II.16 Garis Kemiskinan Penduduk Kota Ambon 2009-2013

#### b.4. Kesempatan Kerja

Berdasarkan Data Base Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon tahun 2015, penduduk Kota Ambon bila dilihat dari jenis pekerjaan (Gambar II.17), terdiri dari belum/tidak bekerja sebanyak 153.238 jiwa (37,81%); pelajar/ mahasiswa sebanyak 87.728 jiwa (21,56%); karyawan swasta/ wirausaha sebanyak 72.414 jiwa (17,87%); mengurus rumah tangga sebanyak 51.096 jiwa (12,61%); PNS/TNI/ Guru/Dosen/Tenaga Medis-Non Medis sebanyak 33.350 jiwa (8,46%); pensiunan sebanyak 7.051 jiwa (1,74%); dan lain-lain sebanyak 379 jiwa (0,09%).



Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon, 2015

Gambar II.17. Jenis Pekerjaan Penduduk Kota Ambon Tahun 2014

Penduduk yang belum/tidak bekerja tahun 2014 sebanyak 153.238 jiwa apabila dikurangi dengan penduduk pra sekolah sebanyak 52.693 jiwa, dan penduduk usia di atas 55 tahun sebanyak 60.634 jiwa, maka terdapat 39.911 jiwa (9,8%) penduduk usia produktif di Kota Ambon yang belum/tidak bekerja atau menganggur.

### **c. Seni, Budaya dan Olahraga**

Pembangunan bidang seni, budaya dan olahraga sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan) sasaran pencapaian pembangunan bidang sosial budaya dan keagamaan yaitu (i) untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab; serta (ii) mewujudkan bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera.

Penyelenggaraan seni, dan budaya serta olahraga di Kota Ambon sangat mendapat apresiasi positif dari masyarakat, mengingat seni dan budaya sangat kental dengan dinamika kehidupan dalam masyarakat. Sebagai kota budaya, dan kota seni, Kota Ambon disebutkan pula sebagai kota musik (*city of music*), dengan terpelihara seni dan budaya local, termasuk pengembangan Negeri – Negeri di Kota Ambon sebagai desa adat dan budaya.

Terdapat beberapa sanggar seni, event organizer, ataupun grup-grup music dan paduan suara yang secara berkala melakukan pentas seni, dan budaya. Pada acara-acara tingkat internasional, nasional, maupun local, pentas seni dan budaya menjadi sungguhan tetap, untuk tetap mendorong kecintaan terhadap perilaku yang beretika, berakhlak mulia, dan berbudaya. Lokasi pentas seni dan budaya di Kota Ambon antara lain Lapangan Merdeka, Taman Pattimura, Taman Gong Perdamaian, Sport Hall Karang Panjang, Gedung Budaya, Lapangan Mandala, dan berbagai gedung pertemuan baik milik pemerintah maupun masyarakat.

Pada sisi lain, sarana olah raga yang tersedia di Kota Ambon, tersebar di berbagai tempat, dan umumnya adalah milik masyarakat atau swasta. Sarana olahraga yang dimiliki Pemerintah adalah Stadion Mandala Remaja sebagai kesatuan pembinaan olahraga di Kota Ambon dan Provinsi Maluku, Lapangan Merdeka untuk sepak bola dan atletik, Lapangan Volley, Lapangan Basket di Taman Pattimura, serta Sport Hall untuk Tinju, Bulu Tangkis, dan jenis-jenis olahraga *indoor* lainnya.

### **2.1.3. Aspek Pelayanan Umum**

Pelayanan umum di Kota Ambon meliputi Urusan wajib dan urusan pilihan, yaitu:

**1. Urusan Wajib**

**a. Pendidikan**

**1) Rasio Ketersediaan Sekolah, serta Rasio Guru dan Murid**

a) Sekolah Dasar (SD)/ Madrasah Ibtidayah (MI)

Pada tahun 2014 jumlah sekolah pada jenjang pendidikan SD/MI di Kota Ambon tidak mengalami perubahan dibanding tahun 2013 yaitu berjumlah 210 sekolah (Tabel II.9). Pada sisi lain jumlah guru untuk jenjang pendidikan SD/MI berjumlah 2.381 orang, dan murid 40.892 orang. Dengan demikian secara rasio pada tahun 2014 menunjukkan bahwa 1 orang guru mendidik 17 orang murid, dan setiap sekolah menampung 195 murid.

Tabel II.9. Jumlah Sekolah, Gedung, Murid, Guru, Rasio Murid/Guru, dan Rasio Murid/ Sekolah Tingkat SD/ MI Tahun 2011 – 2014

Jenjang SD/ MI	Kondisi Per Tahun			
	2011	2012	2013	2014
Jumlah Sekolah	206	209	210	210
Jumlah Gedung Sekolah (unit)	143	146	146	146
Jumlah Murid (orang)	40.213	40.833	40.562	40.892
Jumlah Guru (orang)	2.574	2.532	2.436	2.381
Rasio Murid/Guru	15 : 1	16 : 1	17 : 1	17 : 1
Rasio Murid/Sekolah	188 : 1	195 : 1	193 : 1	195 : 1

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Ambon, 2015

b) Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiah (MTs)

Jumlah sekolah pada jenjang SMP/MTs di Kota Ambon tahun 2013 tidak mengalami perubahan dari tahun 2013 yaitu 57 sekolah (Tabel II.10). Pada sisi lain jumlah guru untuk jenjang pendidikan SMP/MTs berjumlah 1.262 orang, dan murid 19.134 orang. Dengan demikian secara rasio pada tahun 2014 menunjukkan bahwa 1 orang guru mendidik 15 orang murid, dan setiap sekolah menampung 336 murid.

c) Sekolah Menengah Atas (SMA)/ Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/ Madrasah Aliyah (MA).

Jumlah sekolah pada jenjang SMA/SMK/MA di Kota Ambon tahun 2013 adalah 56 sekolah (Tabel II.11). Hal ini berarti terjadi penambahan sebanyak 1 sekolah dari tahun sebelumnya, yaitu SMK Kesehatan Trimurti Husadah Jln. PHB Halong Atas.

Tabel II.10. Jumlah Sekolah, Gedung, Murid, Guru, Rasio Murid/ Guru, dan Rasio Murid/ Sekolah Tingkat SMP/ MTs Tahun 2011 – 2014

Jenjang SMP/ MTs	Kondisi Per Tahun			
	2011	2012	2013	2014
Jumlah Sekolah	54	57	57	57
Jumlah Gedung Sekolah (unit)	50	52	52	52
Jumlah Murid (orang)	17.790	18.138	18.834	19.134
Jumlah Guru (orang)	1.409	1.337	1.294	1.262
Rasio Murid/Guru	13 : 1	12 : 1	15 : 1	15 : 1
Rasio Murid/Sekolah	329 : 1	318 : 1	330 : 1	336 : 1

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Ambon, 2015

Tabel II.11. Jumlah Sekolah, Gedung, Murid, Guru, Rasio Murid/ Guru, dan Rasio Murid/ Sekolah Tingkat SMA/ SMK/MA Tahun 2011 – 2014

Jenjang SMA/ SMK/ MA	Kondisi Per Tahun			
	2011	2012	2013	2014
Jumlah Sekolah	47	50	55	56
Jumlah Gedung Sekolah (unit)	43	49	49	49
Jumlah Murid (orang)	19.261	20.303	21.438	21.680
Jumlah Guru (orang)	1.475	1.493	1.462	1.451
Rasio Murid/Guru	14 : 1	13 : 1	15 : 1	15 : 1
Rasio Murid/Sekolah	426 : 1	406 : 1	390 : 1	387 : 1

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Ambon, 2015

Pada sisi lain jumlah guru untuk jenjang pendidikan SMA/SMK/ MA berjumlah 1.451 orang, dan murid 21.680 orang. Dengan demikian secara rasio pada tahun 2014 menunjukkan bahwa 1 orang guru mendidik 15 orang murid, dan setiap sekolah menampung 387 murid.

## 2) Pendidikan Usia Dini

Pendidikan usia dini di Kota Ambon dilakukan melalui Kelompok Taman Bermain (play group) dan Taman Kanak-Kanak (TK)/ Raudathul Athfal (RA), yang dikelola oleh masyarakat dengan pembinaan Dinas Pendidikan Kota Ambon.



Pada tahun 2014 jumlah sekolah pada jenjang pendidikan TK/RA di Kota Ambon tidak mengalami perubahan dibanding tahun 2013 yaitu berjumlah 83 sekolah (Tabel II.12.). Pada sisi lain jumlah guru untuk jenjang pendidikan TK/RA berjumlah 103 orang, dan murid 3.787 orang. Dengan demikian secara rasio pada tahun 2014 menunjukkan bahwa 1 orang guru mendidik 36 orang murid, dan setiap sekolah menampung 45 murid.

Tabel II.12. Jumlah Sekolah, Gedung, Murid, Guru, Rasio Murid/Guru, serta Rasio Murid/Sekolah Tingkat Sekolah TK Tahun 2011 – 2014.

Jenjang TK	Kondisi Per Tahun			
	2011	2012	2013	2014
Jumlah Sekolah	80	81	83	83
Jumlah Gedung Sekolah (unit)	71	81	82	82
Jumlah Murid (orang)	3.419	3.701	3.755	3.787
Jumlah Guru (orang)	123	115	105	103
Rasio Murid/ Guru	28 : 1	33 : 1	36 : 1	36 : 1
Rasio Murid/ Sekolah	43 : 1	46 : 1	45 : 1	45 : 1

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Ambon, 2015

### 3) Angka Putus Sekolah

Angka putus sekolah di Kota Ambon, pada tahun 2014 cenderung cenderung menurun (Tabel II.13). Pada jenjang SD/MI, tidak ditemukan siswa putus sekolah pada tahun 2014. Meskipun telah menurun pada tahun 2014, masih dijumpai anak putus sekolah pada jenjang SMP/MTs dan SMA/MA/SMK, yang perlu ditangani secara komprehensif di tahun-tahun mendatang.

Tabel II.13. Angka Putus Sekolah di Kota Ambon Tahun 2011 – 2014.

Angka Putus Sekolah	Kondisi Per Tahun (%)			
	2011	2012	2013	2014
SD/MI	0,06	0,07	0,07	0,00
SMP/ MTS	0,12	0,12	0,12	0,01
SMA/ SMK/ MA	0,35	0,34	0,34	0,17

Sumber: LPPD Kota Ambon Tahun 2014

### 4) Angka Kelulusan Siswa

Tingkat kelulusan untuk jenjang SD/MI pada tahun 2014 adalah 99,80%, setelah selama 3 tahun terakhir adalah 100%. Hal ini disebabkan karena ada siswa yang sudah terdaftar mengikuti ujian

akhir, namun pada saat ujian tidak hadir. Pada sisi lain untuk jenjang SMP/MTs, dan SMK mengalami peningkatan, sedangkan jenjang SMA/MA mengalami penurunan (Tabel II.14). Tingkat kelulusan ini diukur dengan standar nilai yaitu 5,50 yang merupakan hasil akhir dari ujian nasional termasuk ujian mengulang sesuai aturan yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Tabel II.14. Angka Kelulusan UAN Siswa di Kota Ambon Tahun 2011 - 2014

No.	Jenjang Pendidikan	Angka Kelulusan Kota Ambon (%)				Angka Kelulusan Provinsi Maluku Tahun 2014 (%)
		2011	2012	2013	2014	
1	SD/ MI	100	100	100	99,80	99,98
2	SMP/ MTs	99,88	99,40	96,88	99,83	99,96
3	SMA/ MA	99,93	99,29	99,09	98,70	99,22
4	SMK	99,68	92,24	99,23	99,28	99,69

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Ambon dan Dinas Pendidikan Prov Maluku 2015

Tingkat kelulusan siswa yang mengikuti Ujian Akhir Nasional (UAN) tahun 2014 untuk semua jenjang, masih dibawah presentase tingkat kelulusan di Provinsi Maluku, yang perlu diperkuat lagi untuk tahun-tahun mendatang.

#### b. Kesehatan

Pelayanan di bidang kesehatan selama tahun 2011 sampai 2014 (Tabel II.15), menunjukkan bahwa ada beberapa komponen yang telah tercapai baik, namun ada pula yang masih perlu ditingkatkan.

Pada tahun 2014, cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan, cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA, dan cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit Demam Berdarah Daegue (DBD) adalah 100%. Pada komponen cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani, Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI), dan Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin, dalam 4 tahun terakhir menunjukkan kecenderungan peningkatan. Pada sisi lain cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan, dan cakupan kunjungan bayi mengalami penurunan pada tahun 2014, yang penanganan secara komprehensif ke depan.

Tabel II.15. Capaian Urusan Kesehatan di Kota Ambon Tahun 2011 - 2014

No	Komponen	Capaian Per Tahun (%)			
		2011	2012	2013	2014
1	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	63	26	38	65
2	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	87	88	89	74
3	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	96	78	90	90
4	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100	100	100	100
5	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	55	65	61	100
6	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100	100	100	100
7	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	6,72	81,54	3,88	11,54
8	Cakupan kunjungan bayi	92,18	94	98,3	78,6

Sumber: Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Ambon, Tahun 2011, 2012, 2013, dan 2014

### c. Lingkungan Hidup, dan Tata Ruang

Pelayanan di bidang lingkungan dan tata ruang hidup selama tahun 2011 sampai 2014 (Tabel II.16), menunjukkan bahwa terjadi fluktuasi pada beberapa komponen.

Seiring dengan program Ambon Bersih, kesadaran masyarakat membuang sampah dan jalur pelayanan sampah lebih meningkat. Namun demikian cakupan penanganan sampah pada tahun 2014 adalah sebesar 54,59%, dan sarana persampahan berupa TPS per 1000 penduduk adalah 1,33. Pada sisi lain, ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber-HPL/HGB adalah 217,6%, karena memperhitungkan dan memasukan luas hutan lindung sebagai bagian utuh wilayah Kota Ambon.

Tabel II.16. Capaian Urusan Lingkungan Hidup dan Tata Ruang di Kota Ambon Tahun 2011-2014

No	Komponen	Capaian Per Tahun			
		2011	2012	2013	2014
1	Penanganan sampah (%)	51,98	56,34	56,34	54,59
2	Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk (Per Seribu)	0,015	1,13	1,889	1,33
3	Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB (%)	12,23	14	15	217,6

Sumber: Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Ambon, Tahun 2011, 2012, 2013, dan 2014

**d. Pekerjaan Umum, dan Perumahan**

Pelayanan di bidang pekerjaan umum dan perumahan selama tahun 2011 sampai 2014 adalah sebagaimana Tabel II.17. Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian adalah panjang jalan dalam kondisi baik mengalami penurunan menjadi 81,06% pada tahun 2014, disebabkan akibat beberapa ruas jalan yang mengalami kerusakan akibat bencana alam tahun 2012, dan 2013, belum semuanya diperbaiki. Selain itu rumah tangga bersanitasi dan rumah tangga pengguna air bersih mengalami juga penurunan, yang perlu diperhatikan ke depan, mengingat target 100-0-100 pada RPJMN 2015-2019, yaitu 100% akses air minum, 0% kawasan permukiman kumuh, dan 100% akses sanitasi layak.

Tabel II.17. Capaian Urusan Pekerjaan Umum, dan Perumahan di Kota Ambon Tahun 2011-2014

No	Komponen	Capaian Per Tahun (%)			
		2011	2012	2013	2014
1	Panjang jalan Kota dalam kondisi baik	92	92	82	81,06
2	Rumah Tangga Bersanitasi	78	71,43	95,42	75
3	Rumah tangga pengguna air bersih	36	36	84,76	26,58
4	Lingkungan pemukiman kumuh	19,81	19,81	19,81	0,29
5	Rumah layak huni	72,98	73,75	72,56	77,58

Sumber: Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Ambon, Tahun 2011, 2012, 2013, dan 2014

**e. Perencanaan Pembangunan**

Pelayanan di bidang perencanaan pembangunan selama tahun 2011 sampai 2014 adalah sebagaimana Tabel II.118. Kota Ambon telah mempunyai dokumen perencanaan yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Ambon Tahun 2006-2026, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2006; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Ambon Tahun 2011-2016, berdasarkan Peraturan Walikota Ambon Nomor 3 Tahun 2011, yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, yaitu Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 11 Tahun 2013; serta Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Ambon setiap tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota. Untuk tahun 2014, RPPD Kota Ambon Tahun 2014 ditetapkan dengan Peraturan Walikota Ambon Nomor 7 Tahun 2013.

Tabel II.18. Capaian Urusan Perencanaan Pembangunan di Kota Ambon Tahun 2011-2014

No	Komponen	Capaian Per Tahun			
		2011	2012	2013	2014
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD (%)	57,60	45,29	99,44	91,32

Sumber: Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Ambon, Tahun 2011s.d. 2014

#### f. Koperasi dan UKM

Pelayanan di bidang Koperasi dan Usaha Kecil Mikro (UKM) selama tahun 2011 sampai 2014 adalah sebagaimana Tabel II.19. Selama empat tahun terakhir, koperasi aktif di Kota Ambon adalah lebih dari 80% dari koperasi yang ada, sedangkan Usaha Mikro Kecil adalah 97,75% dari Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang ada di Kota Ambon. Hal ini menunjukkan bahwa koperasi dan UKM telah menjadi penggerak yang baik bagi dinamika perekonomian di Kota Ambon.

Tabel II.19. Capaian Urusan Koperasi dan UKM di Kota Ambon Tahun 2011-2014

No	Komponen	Capaian Per Tahun (%)			
		2011	2012	2013	2014
1	Koperasi Aktif	82,11	82,65	83,15	83,22
2	Usaha Mikro Kecil	95,21	98,24	96,38	97,75

Sumber: Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Ambon, Tahun 2011, 2012, 2013, dan 2014

#### g. Kependudukan dan Catatan Sipil

Pelayanan di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil selama tahun 2011 sampai 2014 adalah sebagaimana Tabel II.20. Selama empat tahun terakhir, Kota Ambon telah menerapkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nasional berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang bersinergi dalam KTP Elektronik (E-KTP), dimana kepemilikan KTP sampai tahun 2014 telah mencapai 78,29 penduduk yang wajib KTP. Pada sisi lain, kepemilikan akta kelahiran di masyarakat sudah cukup baik yaitu 15,45 pada 1000 penduduk, jika dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 1,58 per 1000 penduduk. Ke depan, kepemilikan Akta Kelahiran oleh

masyarakat akan terus didorong, agar ada kepastian pencatatan sipil bagi penduduk Kota Ambon.

Tabel II.20. Capaian Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil di Kota Ambon Tahun 2011-2014

No	Komponen	Capaian Per Tahun			
		2011	2012	2013	2014
1	Kepemilikan KTP (%)	15,75	24,60	78,29	78,29
2	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	1,10	1,50	1,58	15,45
3	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah

Sumber: Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Ambon, Tahun 2011, 2012, 2013, dan 2014

#### **h. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera; serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Pelayanan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera; serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selama tahun 2011 sampai 2014 (Tabel II.21), menunjukkan perkembangan yang lebih baik, meskipun ada juga yang perlu ditingkatkan ke depan, seperti partisipasi angkatan kerja perempuan, dan partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan.

Tabel II.21. Capaian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera; serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kota Ambon Tahun 2011-2014

No	Komponen	Capaian Per Tahun (%)			
		2011	2012	2013	2014
1	Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	83,97	6,34	10,05	10,04
2	Angka melek huruf perempuan usia 15th keatas	99,92	99,76	99,92	99,92
3	Partisipasi angkatan kerja perempuan	45,88	87,7	86,08	44,92
4	Prevalensi peserta KB aktif	80,94	81,30	74,78	72,63
5	PKK Aktif	100	100	100	100
6	Posyandu Aktif	77,03	80,50	100	100

Sumber: Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Ambon, Tahun 2011, 2012, 2013, dan 2014

## **2. Urusan Pilihan**

Capaian urusan pilihan di Kota Ambon selama tahun 2011-2014 adalah sebagaimana Tabel II.22. Beberapa komponen menunjukkan capaian yang meningkat seperti konsumsi ikan, kunjungan wisata, dan ekspor

bersih perdagangan yang mengalami surplus. Namun demikian ada juga komponen yang masih perlu ditingkatkan pada masa-masa depan seperti di produksi perikanan, produktivitas pertanian, serta rehabilitasi hutan dan lahan kritis.

Tabel II.23. Capaian Urusan Pilihan di Kota Ambon Tahun 2011-2014

No	Komponen	Capaian Per Tahun			
		2011	2012	2013	2014
1	Perikanan				
	a. Produksi perikanan (%)	107,91	104,79	101,17	77
	b. Konsumsi ikan (%)	22	25	26	54
2	Pertanian				
	a. Produktivitas bahan pangan utama lokal lainnya per hektar (ton/ha)	18,04	17,49	17,49	7,23
3	Kehutanan				
	a. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis (%)	0,71	68,21	68,21	27,98
	b. Kerusakan Kawasan Hutan (%)	33,14	3,7	3,53	2,35
4	Pariwisata				
	a. Kunjungan wisata (orang)	1.905	6.319	2.457	5.162
5	Perindustrian				
	a. Pertumbuhan Industri (%)	2,14	2,34	15,10	8,68
6	Perdagangan				
	a. Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)	28,79	28,70	24,42	23,21
	b. Ekspor Bersih Perdagangan (000 US\$)	(286.134)	(286.124)	(166.752)	278.230

Sumber: Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Ambon, Tahun 2011, 2012, 2013, dan 2014

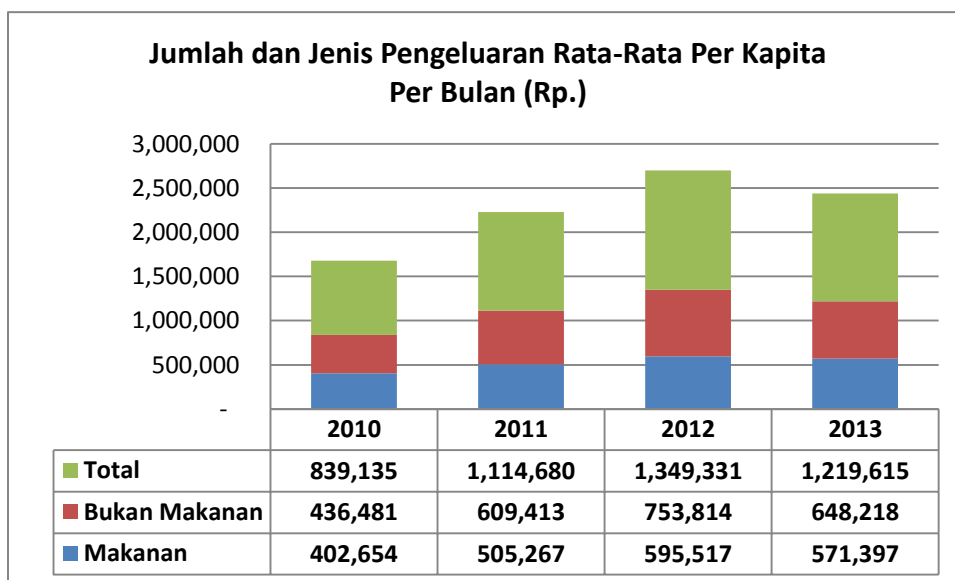
#### 2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah Kota Ambon selama 3 tahun terakhir, khususnya di aspek ekonomi dan infrastruktur wilayah dapat dijelaskan seperti di bawah ini.

##### 1. Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi daerah Kota Ambon dapat tergambarkan dari pengeluaran rata-rata per kapita sebulan penduduk, yang meliputi pengeluaran untuk makanan, dan pengeluaran untuk bukan makanan. Selama tahun 2010-2013, pengeluaran per kapita penduduk Kota Ambon (Gambar II.18), meningkat sebesar rata-rata 14,76% per tahun. Pada tahun 2013, pengeluaran per kapita sebulan penduduk Kota Ambon adalah Rp.1.219.615,- atau menurun sebesar 9,61% dari tahun 2013. Dari

pengeluaran tersebut, sebanyak 46,85% digunakan untuk makanan, dan sisanya 53,15% untuk bukan makanan.



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Ambon, 2014

Gambar II.18. Jumlah dan Jenis Pengeluaran Per Kapita Kota Ambon Tahun 2010-2012

Pengeluaran rata-rata per kapita untuk makanan pada tahun 2013, terutama digunakan untuk makanan jadi (24,93%), tembakau (12,11%), padi-padian (11,46%), dan ikan (11,38%). Sedangkan pengeluaran bukan makanan terutama digunakan untuk perumahan dan fasilitasnya (42,42%), serta barang dan jasa (31,32%). Mengacu kepada pengeluaran untuk makanan, dimana tembakau adalah pengeluaran utama setelah makanan jadi, menunjukkan kecenderungan bahwa rokok tidak mudah terlepas dari kebutuhan sehari-hari masyarakat, dan gaya hidup yang tidak sehat ini masih menjadi kebutuhan, yang perlu mendapat perhatian ke depan.

## 2. Fasilitas wilayah/Infrastruktur

Pengaturan ruang di Kota Ambon berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RRTW) Kota Ambon Tahun 2011-2031, sesuai Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 24 Tahun 2012. RTRW Kota Ambon ini mengatur pola ruang, dan struktur ruang kota Ambon, dalam mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, terkendali, dan berkelanjutan. Pada sisi lain, fasilitas dan infrastruktur wilayah yang ada di Kota Ambon turut menunjang fungsi dan peran, sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN), ibukota Provinsi Maluku.

Berdasarkan data BPS, 2014, total panjang jalan di Kota Ambon tahun 2013 tidak berubah dari tahun 2012 yaitu 353.096 km, yang meliputi jalan



Nasional sepanjang 42,829 km (12%), jalan Provinsi sepanjang 38,687 km (11%), dan sisanya adalah jalan Kota sepanjang 271,580 km (77%). Jalan tersebut jika dirinci berdasarkan jenis permukaan terdiri dari hotmix sepanjang 284,846 km, atau 80,67% dari panjang jalan di kota Ambon. Seluruh jalan Nasional dan jalan Provinsi berpermukaan hotmix. Jalan Kota berpermukaan hotmix adalah sepanjang 203,33 km (74,87%), sedangkan sisanya berpermukaan lapen sepanjang 57,64 km (21,22%), rabat beton sepanjang 2,27 km (0,84%), kerikil sepanjang 4,29 km (1,58%), dan tanah sepanjang 4,05 km (1,49%).

Pada sisi lain, berdasarkan kondisi jalan, maka dari 353,096 km jalan di Kota Ambon, terdapat 306,914 km (86,80%), 10,17 km dalam kondisi sedang (2,88%), 22,312 km dalam kondisi rusak ringan (6,31%), dan 14,2 km dalam kondisi rusak berat (4,02%). Kondisi selengkapnya jalan di Kota Ambon adalah seperti Tabel II.23.

Tabel II.23. Ruas Jalan di Kota Ambon Tahun 2013

No	Uraian	Ruas Jalan di Kota Ambon				
		Nasional	Provinsi	Kota	Jumlah	%
1	<b>Panjang (m)</b>	42,829	38,687	271,580	353,096	
2	<b>Jenis Permukaan</b>					
	a. Hotmix	42,829	38,687	201,820	284,846	80,67%
	b. Lapen			57,640	57,640	16,32%
	c. Rabat beton			2,270	2,270	0,64%
	d. Kerikil			4,290	4,290	1,21%
	e. Tanah			4,050	4,050	1,15%
3	<b>Kondisi Jalan</b>					
	a. Baik	40,678	28,356	237,880	306,914	86,80%
	b. Sedang	-	-	10,170	10,170	2,88%
	c. Rusak Ringan	1,681	10,331	10,300	22,312	6,31%
	d. Rusak Berat	470	-	13,730	14,200	4,02%

Sumber: Kota Ambon Dalam Angka, 2014

Infrastruktur wilayah lain di Kota Ambon adalah Bandar Udara Internasional Pattimura, yang melayani penerbangan nasional ke seluruh Indonesia, termasuk penerbangan domestic dalam Provinsi Maluku. Selain itu untuk transportasi laut terdapat Pelabuhan Yos Sudarso untuk melayani rute pelayaran nasional, serta pelabuhan Slamet Riyadi dan Pelabuhan Gudang Arang untuk pelayaran domestic dan Perintis. Pada sisi lain, untuk memenuhi kebutuhan konektivitas dengan pulau-pulau di Provinsi Maluku, terdapat pula dermaga Angkutan Sungai Darat dan antar Pulau (ASDP) di Negeri Halong.

Tabel II.25. Rekapitulasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2014

NO	NAMA SKPD	JUMLAH	JUMLAH	REALISASI		
		KEGIATAN	PAGU	% FISIK	DANA	% DANA
1	2	3	4	5	6	7
1	BPMP-KB	53	Rp 2,910,692,180	92.21%	Rp 2,108,770,866	72.45%
2	BAPPEKOT	45	Rp 6,291,200,570	82.44%	Rp 5,243,655,169	83.35%
3	Badan Kepegawaian	24	Rp 3,739,060,550	52.46%	Rp 1,813,999,450	48.51%
4	Badan Pengelola Keuangan	57	Rp 9,294,785,696	94.89%	Rp 8,665,616,053	93.23%
5	Inspektorat	21	Rp 1,987,273,850	39.65%	Rp 806,954,390	40.61%
6	Dinas Pendidikan	85	Rp 33,283,137,962	97.06%	Rp 29,375,933,666	88.26%
7	Dinas Kesehatan	100	Rp 20,452,088,789	85.79%	Rp 13,075,958,498	63.93%
8	Dinas Sosial	35	Rp 2,347,851,596	97.71%	Rp 2,177,630,627	92.75%
9	Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Ekonomi Daerah	33	Rp 5,958,035,138	94.24%	Rp 5,633,733,529	94.56%
10	Dinas Tenaga Kerja	35	Rp 776,237,875	97.20%	Rp 765,449,385	98.61%
11	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga	32	Rp 5,129,008,150	73.30%	Rp 4,349,189,150	84.80%
12	Dinas Perhubungan	19	Rp 4,784,518,605	92.35%	Rp 3,898,253,290	81.48%
13	Dinas Pekerjaan Umum	35	Rp 57,055,321,186	98.92%	Rp 49,389,258,020	86.56%
14	Dinas Pertanian dan Kehutanan	42	Rp 5,234,515,662	93.44%	Rp 4,938,551,149	94.35%
15	Dinas Kelautan dan Perikanan	17	Rp 8,745,528,984	83.14%	Rp 6,643,505,650	75.96%
16	Dinas Koperasi dan UKM	33	Rp 1,305,091,600	93.05%	Rp 1,191,236,315	91.28%
17	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	35	Rp 5,052,416,549	82.61%	Rp 2,454,695,650	48.58%
18	Dinas Kependudukan dan CAPIL	20	Rp 823,748,325	90.85%	Rp 774,951,569	94.08%
19	Dinas Tata Kota	143	Rp 31,112,160,471	76.78%	Rp 25,713,263,145	82.65%
20	Dinas Kebersihan dan Pertamanan	46	Rp 21,741,115,857	92.79%	Rp 18,388,223,329	84.58%
21	Sekretariat DPRD	37	Rp 22,144,895,993	80.82%	Rp 20,176,969,127	91.11%

NO	NAMA SKPD	JUMLAH KEGIATAN	JUMLAH PAGU	REALISASI		
				% FISIK	DANA	% DANA
1	2	3	4	5	6	7
24	Bagian Humas dan Protokoler	19	Rp 3,757,089,898	93.23%	Rp 3,699,646,453	98.47%
25	Bagian Kesejahteraan Rakyat Pengembangan Ekonomi	14	Rp 2,431,942,717	91.43%	Rp 2,391,505,506	98.34%
27	Bagian Organisasi dan Manajemen	18	Rp 494,266,352	97.72%	Rp 475,918,939	96.29%
28	Bagian Umum dan Perlengkapan	44	Rp 35,182,850,601	83.87%	Rp 15,034,652,230	42.73%
29	Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Ekspedisi	14	Rp 257,892,500	90.94%	Rp 220,277,118	85.41%
30	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	16	Rp 3,106,367,400	93.75%	Rp 3,053,736,900	98.31%
31	Kantor Satuan Pemadam Kebakaran	13	Rp 1,711,947,145	95.23%	Rp 1,598,459,100	93.37%
32	Badan Lingkungan Hidup Kota Ambon	45	Rp 2,909,374,752	83.87%	Rp 2,351,871,975	80.84%
33	Kantor Perpustakaan dan Kearsipan	21	Rp 819,411,130	95.24%	Rp 751,685,000	91.73%
34	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu	22	Rp 645,241,125	92.88%	Rp 595,188,022	92.24%
35	Kantor Pengolahan Data dan Elektronik	21	Rp 3,195,715,926	95.24%	Rp 2,932,638,827	91.77%
36	Kecamatan Nusaniwe	24	Rp 530,274,450	91.46%	Rp 495,691,800	93.48%
37	Kecamatan Sirimau	19	Rp 278,526,297	94.47%	Rp 247,618,797	88.90%
38	Kecamatan Teluk Ambon Baguala	16	Rp 239,556,000	89.03%	Rp 196,376,375	81.98%
39	Kecamatan Teluk Ambon	22	Rp 236,366,000	95.45%	Rp 218,686,000	92.52%
40	Kecamatan Leitimur Selatan	24	Rp 567,559,855	63.75%	Rp 449,716,850	79.24%
41	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	30	Rp 9,334,323,225	96.91%	Rp 8,513,730,264	91.21%
	<b>JUMLAH TOTAL</b>	<b>1332</b>	<b>Rp 315,867,390,965</b>	<b>98.36%</b>	<b>Rp 250,813,198,189</b>	<b>99.71%</b>

Sumber: Bappekot Ambon, 2014.

## **2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD**

Pelaksanaan program dan kegiatan untuk belanja langsung pembangunan berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Ambon tahun 2014 pada 41 SKPD terdiri dari 1.392 kegiatan, dengan pagu dana sebesar Rp.318.933.417.048,- (Tabel II.25).

Sampai dengan akhir Desember 2014, telah terealisasi secara fisik sebesar 91,73%, yang menyerap dana sebesar Rp.253.813.688.613,- (84,86%). Program dan kegiatan tersebut, telah mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tahun 2011-2016, sesuai penjabaran tahun 2014, dengan memperhatikan dinamika kebutuhan pembangunan yang terjadi di masyarakat.

## **2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah**

Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kota Ambon dalam pelaksanaan pembangunan selama tahun 2014, yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah, maupun penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, dapat dijelaskan sebagai berikut:

### **1. Peningkatan kualitas layanan pendidikan:**

- a. Masih Kurangnya tenaga kependidikan/ guru dengan kualifikasi S1 di Kota Ambon, serta masih kurangnya tenaga pendidik pada program produktif/ keahlian di jenjang SMK.
- b. Masih terbatasnya kemampuan tenaga kependidikan (TU) pada jenjang Pendidikan SD/MI, SMP/MTs dalam penguasaan Teknologi Informasi dan komunikasi terhadap aplikasi program-program pendidikan berbasis e-net.
- c. Masih lemahnya kemampuan Warga Sekolah dalam penerapan budaya sekolah pada jenjang pendidikan Dasar.
- d. Masih lemahnya kemampuan pengelolaan manajemen Kepala Sekolah, serta masih kurangnya partisipasi komite dalam proses pengembangan sekolah.
- e. Masih kurangnya ruang kelas untuk menunjang proses belajar mengajar bila dibandingkan dengan ketersediaan Rombongan belajar yang ada tersebar pada seluruh jenjang pendidikan karena keterbatasan lahan sekolah.

### **2. Peningkatan kualitas layanan kesehatan:**

- a) Ancaman HIV-AIDS yang tinggi, dimana terdapat 55% penderita HIV-AIDS di Provinsi Maluku terdapat di Kota Ambon (tahun 2013).

- b) Ancaman penyakit menular dari hewan, khususnya Rabies adalah tertinggi di Provinsi Maluku.
- c) Ancaman penyakit menular, seperti TBC, dan Malaria masih terjadi, yang didukung oleh perilaku hidup masyarakat.
- d) Sarana dan prasarana, serta tenaga ahli di bidang mata untuk Klinik Mata AV (Ambon – Vlissingen) masih terbatas.
- e) Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin, belum tertangani secara maksimal.

**3. Penanggulangan kemiskinan:**

- a) Tidak terkendalinya migrasi penduduk dengan kapasitas rendah yang ke Kota Ambon, turut mempengaruhi bertambahnya penduduk miskin.
- b) Lapangan kerja dan kesempatan kerja di Kota Ambon masih sangat terbatas; dibarengi dengan terbatasnya kapasitas dan ketrampilan, menyebabkan pendapatan masyarakat sebagian besar untuk memenuhi pangan dan sandang.
- c) Tingkat pelayanan kesejahteraan sosial terutama bagi penduduk miskin, anak terlantar, anak jalanan, lansia, penyandang cacat tuna social dan korban bencana terbatas
- d) Koordinasi penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan menyeluruh masih perlu ditingkatkan secara optimal.
- e) Masih terdapat perbedaan data penduduk, seperti penduduk miskin, dan pengangguran karena metodologi yang berbeda, khususnya antara BPS, dan lembaga yang melakukan pendataan penduduk seperti Dinas Catatan Sipil; serta Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana.

**4. Peningkatan iklim investasi dan usaha:**

- a) Koperasi belum dikelola secara profesional sebagai unit bisnis dan sosial serta belum berkembang baik dalam masyarakat; serta kurangnya motivasi, inisiatif dan kreatif dalam pemanfaatan potensi yang tersedia;
- b) Manajemen usaha, dan kapasitas pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah belum optimal;
- c) Akses ke permodalan sebagai pendukung kegiatan usaha belum berkembang baik; termasuk akses ke informasi pasar dan perdagangan masih lemah.
- d) Petani dan nelayan masih menjual produk primer;
- e) Terbatasnya sumberdaya manusia aparaturnya pengawasan barang dan jasa; serta belum ada perlindungan terhadap produk-produk asli daerah.
- f) Belum tertata dan berkembang secara optimal potensi wisata di Kota Ambon; termasuk belum terintegrasi pengembangan sektor

pariwisata dengan sektor lain sebagai suatu paket perjalanan wisata di Kota Ambon;

- g) Belum optimal penyediaan infrastruktur penunjang pariwisata seperti air bersih, resort, dan fasilitas pendukung lain; serta belum tersedia SDM yang profesional di bidang pariwisata.
- h) Masih kurangnya promosi secara nasional dan internasional tentang pariwisata di Kota Ambon.

**5. Penataan lingkungan dan penanggulangan bencana:**

- a) Ancaman bencana alam banjir dan longsor mengintai setiap musim hujan, akibat tekanan terhadap lahan atas, dan perilaku masyarakat yang belum tertib sampah.
- b) Degradasi hutan lindung dan kawasan penyangga akibat permukiman, berakibat juga kepada berkurangnya debit air permukaan pada musim panas.
- c) Sanitasi yang sehat masih perlu ditingkatkan, khususnya pengelolaan limbah rumah tangga, drainase yang baik, ketersediaan air bersih, dan kesadaran membuang sampah dengan tertib.
- d) Kerusakan infrastruktur dan permukiman akibat bencana alam tahun 2012 dan 2013 belum semuanya terehabilitasi.

**6. Infrastruktur:**

- a) Kondisi infrastruktur fisik jalan di Kecamatan Leitimur Selatan dan sebagian Kecamatan Nusaniwe yang rusak akibat bencana alam dan medan yang tidak menguntungkan, belum semuanya diperbaiki.
- b) Belum memadainya infrastruktur sumberdaya air guna mendukung upaya konservasi sumberdaya air dan pendaagunaannya, mengingat kondisi suplay air tanah yang semakin berkurang;
- c) Masih terdapat kawasan perumahan dan permukiman yang tidak ramah lingkungan dalam wilayah perkotaan;
- d) Lemahnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar permukiman (air bersih, air limbah, persampahan).
- e) Menurunnya kualitas air permukaan, khususnya sungai-sungai di Pusat Kota Ambon dari buangan air limbah domestik;
- f) Masih terdapat drainase yang tidak memenuhi syarat dan kurang mendukung estetika lingkungan perkotaan.

**7. Penguatan kapasitas birokrasi dan tata kelola**

- a) Tata kelola keuangan daerah belum berjalan optimal, sehingga Laporan Keuangan Kota Ambon belum mencapai Wajar Dengan Pengecualian.
- b) Proporsi Belanja Langsung terhadap total APBD Kota masih dibawah 50%, pada kisaran 30-35%.

- c) Dalam pelaksanaan penataan kelembagaan selalu diperhadapkan peraturan perundang-undangan tentang pembentukan organisasi, yang kurang harmonis dan tumpang tindih yang menimbulkan ambiguitas dan kesulitan bagi pelaksana kebijakan, dan adanya perubahan kebijakan pada level Pemerintah Pusat yang terlalu cepat, menimbulkan inefisiensi dan tidak efektifnya pelaksanaan regulasi pemerintah di Pemerintah Kota.
- d) Date Base Kecamatan belum tersusun sesuai jangka waktu pelaporan disebabkan karena keterlambatan data dari desa/kelurahan.
- e) Kurangnya perhatian dari aparaturnya ditingkat Negeri/Desa/Kelurahan terhadap penyelesaian masalah pemerintahan, menimbulkan persoalan lain yaitu berlarut-larutnya penyelesaian yang memakan waktu panjang, disamping faktor lain seperti kondisi geografis wilayah, tingkat pemahaman terhadap ketentuan, dan minimnya partisipasi.
- f) Dalam rangka mewujudkan aparaturnya yang profesional, masih diperhadapkan pada terbatasnya pengetahuan, wawasan, dan kemampuan aparaturnya. Selain itu masih ditemukan keterbatasan sarana dan prasarana pendukung untuk menunjang optimalisasi kinerja aparaturnya dan lembaga.
- g) Masih adanya praktek percaloan/ makelar izin yang dilakukan oleh aparaturnya Pemerintah Kota Ambon, yang cenderung mengurangi nilai positif pelaksanaan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PPTSP), walaupun sudah dikeluarkannya Surat Edaran Walikota Ambon Nomor 068/233/Setkot Tentang Larangan Bagi Pegawai sebagai Calo.
- h) Pendataan asset daerah belum dilakukan secara berkesinambungan.